

**FEODALISME KEPEMIMPINAN (TINJAUAN
SOSIOPOLITIK MASYARAKAT KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Pogramstudi Pendidikan Sosiologi
Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

SITI SALMI

10538296114

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Feodalisme Kepemimpinan (Tinjauan Sosiopolitik Masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat).

Nama : Siti Salmi

NIM : 10538296114

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar



Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Siti Salmi**, NIM 10538296114 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 189/Tahun 1440 H/2018 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018.

08 Safar 1440 H
Makassar, _____
18 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

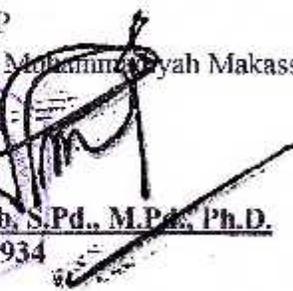
Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji :

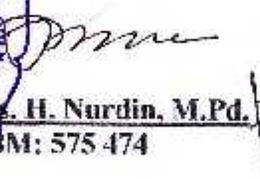
1. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.
2. Risfaisal, S.Pd., M.Pd.
3. Suardi, S.Pd., M.Pd.
4. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

MOTTO

“Barang Siapa Beriman Kepada Allah dan Hari Akhir, Maka Hendaklah Ia Berkata Baik atau Diam”.
(Muhammad Sallahualaihi Wasallam)

“SAMBUT MASA DEPAN CEMERLANG DENGAN BERILMU SELAMA ADA KEYAKINAN SEMUA AKAN MENJADI MUNGKIN”

Kupersembahkan karya yang sederhana ini semata-mata hanyalah kepada kedua orang tuaku yang selama ini telah membesarkan, memberi semangat dan tak henti-hentinya mendoakan demi kebahagiaan dan kesuksesan anaknya, serta seluruh keluarga dan teman-temanku yang senantiasa mendoakan dan membantu atas segala pencapaianku saat ini

ABSTRAK

Siti Salmi, 2018. “Feodalisme Kepemimpinan (Tinjauan Sosiopolitik Masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat)”. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. Hj. Roslaeny Babo, M.Si dan Suardi, S.Pd.,M.Pd.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk feodalisme kepemimpinan pada masyarakat komodo, untuk mengetahui implikasi feodalisme kepemimpinan pada masyarakat komodo, dan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap sistem kepemimpinan feodalisme pada masyarakat komodo.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan sumber datanya berupa angka-angka melainkan menggunakan penggambaran yang terjadi di lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa feodalisme kepemimpinan yang ada di desa Pasir Panjang masih dipengaruhi oleh strata sosial *aha madia* dan *aha madiata*. Kuatnya tradisi masyarakat terhadap strata sosial tersebut, memberikan peluang besar kepemimpinan untuk dipegang oleh orang-orang dari kalangan atas atau bangsawan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa feodalisme kepemimpinan pada masyarakat komodo dipengaruhi oleh strata sosial masyarakat yang dimana memilih pemimpin dari kalangan orang kaya.

Kata Kunci : Feodalisme, Kepemimpinan, Strata Sosial.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung, kepada seluruh makhlukNya terutama manusia. Demikian pula salam dan salawat kepada junjungan kita nabi Muhammad S.A.W yang merupakan panutan kita contoh kita sampai akhir zaman, yang dengan keyakinan ini penulis dapat menyusun proposal yang berjudul: Feodalisme Kepemimpinan (Tinjauan Sosiopolitik Masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat) dapat diselesaikan sebagai salah satu tugas akademik untuk memperoleh gelar sarjana “Sarjana Pendidikan” Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua Ayahanda Ishaka dan Ibunda St. Alang tercinta dengan susah payah dan ketulusannya mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatiannya dalam mendidik dan membesarkan disertai dengan iringan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga ananda dapat membalas setiap tetes keringat yang tercurah demi membantu ananda menjadi seorang manusia yang berguna. Serta sahabat tercinta muhamad iqbal yang selama ini selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan tantangan namun berkat bimbingan, motivasi, dan sumbangan pemikiran dari

berbagai pihak, segala hambatan dan tantangan yang dihadapi penulis dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat penulis hanturkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr.Hj.Roslaeny Babo, M.Si, dan Suardi S.Pd.,M.Pd., selaku pembimbing I dan pembimbing II. Yang telah telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal proposa hingga selesainya skripsi ini.

Selanjutnya dengan penuh rasa hormat penulis menghanturkan banyak terimakasih kepada Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib S.Pd.,M.Pd.,Ph.D, sebagai dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Drs. H. Nurdin M.Pd. dan Kaharuddin, M.Pd., Ph.D. Ketua jurusan dan sekretaris jurusan program studi pendidikan sosiologi atas segala bantuannya dalam administrasi maupun dalam perkuliahan, bapak dan ibu dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan khususnya jurusan pendidikan sosiologi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat terkasih Nurwan, Aslianti, Rosita, Eka dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 Program Studi Pendidikan Sosiologi khususnya kelas B yang telah bersama-sama penulis menjalani masa-masa perkuliahan, atas sumbangan saran dan motivasinya yang telah memberi warna dalam hidup penulis selama ini. Semoga persaudaraan kita tetap abadi untuk selamanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan sarannya dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun, karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan

berarti sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Makassar, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERJANJIAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Operasional	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP	
A. Kajian Teori.....	17

1. Kepemimpinan.....	17
2. Macam-macam Pemimpin	18
3. Teori Kepemimpinan	19
4. Tipe dan Gaya Kepemimpinan	22
5. Sifat, Watak dan Perangai Kepemimpinan	24
6. Kepemimpinan Feodal	27
7. Analisis Teori.....	29
8. Tinjauan Penelitian Relevan	33
B. Kerangka Konsep.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	41
C. Informan Penelitian	42
D. Fokus Penelitian.....	43
E. Instrumen Penelitian	43
F. Jenis dan Sumber Data.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data	45
H. Teknik Analisis Data	49
I. Teknik Keabsahan Data.....	51
BAB IV GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN	
A. Deskripsi Umum Kabupaten Manggarai Barat.....	54
B. Sejarah Singkat Manggarai Barat.....	54
C. Kondisi Geografis dan Iklim.....	56
D. Topografi, Geologi dan Hidrologi.....	58

E. Kondisi Demografi.....	59
F. Deskripsi Khusus Pasir Panjang sebagai Latar Penelitian.....	61
1. Sejarah Singkat Desa Pasir Panjang	61
2. Pendidikan dan Keterampilan	63
3. Mata Pencaharian.....	64
4. Kondisi Sosial Budaya.....	65
5. Kehidupan Keberagamaan	67
BAB V BENTUK FEODALISME KEPEMIMPINAN PADA MASYARAKAT	
KOMODO	69
BAB VI IMPLIKASI FEODALISME KEPEMIMPINAN PADA	
MASYARAKAT KOMODO	75
BAB VII RESPON MASYARAKAT TERHADAP SISTEM KEPEMIMPINAN	
FEODAL PADA MASYARAKAT KOMODO.....	81
BAB VIII PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	43
Tabel 2.....	48
Tabel 3.....	59
Tabel 4.....	60
Tabel 5.....	61
Tabel 6.....	64
Tabel 7.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	56
Gambar 2.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan sebagai salah satu unsur yang penting dari Negara mempunyai posisi yang diterminan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan baik keluar maupun kedalam karena posisinya yang demikian strategis itu maka keberadaan Negara dan khususnya pemerintahan Negara menjadi sangat ditentukan oleh keberhasilan pemerintahan dan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka mencapai tujuan Negara. Atas dasar ini tanpa adanya pemerintah dan pemerintahan, tujuan Negara tidak akan tercapai dan jika kondisi ini terjadi maka kerugian besar akan ditanggung oleh masyarakat Negara pada umumnya, mengingat salah satu tujuan membentuk pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih penting dari itu bahwa keberadaan satu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain, pengakuan suatu Negara yang merdeka itu didasarkan atas adanya pemerintahan yang berdaulat.

Pemerintah dalam praktek pelaksanaannya selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baik yang menyangkut organisasi pemerintah, pemimpin pemerintah, masyarakat yang diperintah, maupun implementasi fungsi pemerintahannya, asas pemerintahan, lingkungan pemerintahan, sistem pemerintahan maupun etika pemerintahan, yang kesemuanya menuntut penanganan yang seksama agar tujuan pemerintahan yang telah dicanangkan itu

dapat dicapai secara efisien dan efektif. Variabel-variabel tersebut di dalam pelaksanaan ternyata memerlukan pemahaman yang cukup serius untuk mencapai keberhasilannya, untuk itu sudah selayaknya jika pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pemerintahan perlu memahami secara baik dan komprehensif terhadap pengetahuan-pengetahuan dimaksud. Di antara variabel-variabel tersebut yang determinan diantaranya adalah kepemimpinan pemerintahan dan etika pemerintahan. Kepemimpinan dan etika pemerintahan mempunyai peranan sentral atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pada tingkat pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten atau Kota.

Realitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik, apalagi dengan telah bergulirnya reformasi di negara Indonesia sehingga memberikan ruang gerak dan partisipasi yang besar pada warga negara untuk terlibat secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan.

Salah satu wujud partisipasi masyarakat yang cukup besar adalah diberikannya kesempatan kepada warga negara pada pemilu untuk memilih dan menentukan wakil-wakilnya yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Kesemuanya merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam bidang politik yaitu untuk menentukan wakil sekaligus pemimpin mereka yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif.

Keberadaan pemimpin dalam masyarakat, bangsa atau negara mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar ialah untuk membawa masyarakat, bangsa dan negara mencapai tujuannya, yaitu sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negarayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (UUD 1945).

Edi Sunanto dan Isma Nudin (2014) dalam “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Bidang Layanan Sipil”. Kepemimpinan menjadi begitu penting bahkan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan kehidupan bernegara. Sedikitnya ada empat alasan tentang urgensi pemimpin dan kepemimpinan yaitu: (1) karena banyaknya kelompok atau masyarakat yang membutuhkan figur pemimpin. (2) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompok. (3) sebagai tempat pengambil alihan resiko bila terjadi masalah terhadap kelompoknya. (4) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut adalah suatu keharusan untuk menentukan seorang pemimpin dalam suatu masyarakat, bangsa atau negara, tetapi bukan berarti pemimpin adalah segala-galanya.

Keberhasilan seorang pemimpin pemerintahan tidak hanya diukur dari sudut seberapa jauh mereka berhasil membangun pemerintahan dan melaksanakan pembangunan tetapi juga diukur seberapa jauh pemimpin pemerintahan itu dalam melaksanakan pemerintahan itu dapat mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat dan melayani kebutuhan masyarakat, untuk terealisasi kondisi ini maka perlunya pemimpin pemerintahan mengetahui dan memahami nilai-nilai yang baik dalam pemerintahan baik yang berasal dari perundang-undangan, nilai-nilai yang berasal budaya masyarakat maupun nilai-nilai yang berasal dari agama.

Keberhasilan seorang pemimpin juga ditentukan oleh kelompok atau masyarakat yang dipimpinnya. Apakah mendapatkan dukungan atau tidak, sehingga pemimpin bisa dikatakan berhasil jika kepemimpinannya mendapat sambutan yang baik dalam suatu kelompok atau masyarakat. Pemimpin yang dibutuhkan adalah

pemimpin yang mampu menampung semua aspirasi rakyatnya, yang mampu memberikan atau mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat yang dipimpinnya untuk menuju arah yang lebih baik. Tetapi kenyataan seperti ini berbeda dengan kepemimpinan feodal yang mana pemimpin tidak perlu berdiskusi dengan masyarakatnya dalam hal mengambil keputusan. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik yang diharapkan oleh masyarakat adalah pemimpin yang mampu menjadi pengayom dalam masyarakat.

Awang Anwaruddin, (2009) dalam “Transformasi Kepemimpinan Birokrasi”. Sosiolog Jerman, Max Weber mengintrodusir tiga macam kepemimpinan, yaitu: *Pertama*, Kepemimpinan Tradisional. Kepemimpinan ini menuntut ketaatan daripada yang dipimpin (rakyat) atas dasar tradisi, yaitu adat istiadat yang turun-temurun (termasuk agama), jadi legitimasi kepemimpinan ini mengacu pada tradisi dan agama. *Kedua*, Kepemimpinan Karismatik. Kepemimpinan ini mengacu pada karisma yang melekat pada sosok tertentu. Dengan kata lain, legitimasi kekuasaan seseorang terletak pada karisma yang ada pada dirinya. *Ketiga*, Kepemimpinan Rasional. Kepemimpinan ini didasarkan pada akal budi. Negara hukum modern adalah bentuk dari jenis kepemimpinan rasional itu. Lembaga-lembaga negara dipilih berdasarkan pertimbangan akal budi rasional manusia.

Kepemimpinan birokrasi yang bersifat feodal masih terjadi di beberapa instansi pemerintah sehingga perlu ada sosialisasi cara kepemimpinan yang transformasional atau cara memimpin yang tidak menekankan pada kekuasaan. “Sudah saatnya orientasi kepemimpinan birokrasi yang bersifat feodalistik diubah ke arah kepemimpinan transformasional,” kata Kepala Lembaga Administrasi

Negara (LAN) Sunarno ketika menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XII yang diselenggarakan LAN, di Jakarta.

Walapun saat ini kepemimpinan yang bersifat transformasional sudah mulai terjadi masih ada kelompok tidak menerapkannya. “Hampir di setiap instansi masih ada yang menggunakan pendekatan lama (gaya kepemimpinan feodal), ‘mindset’ (cara pikir) lama,” katanya. Ia mengatakan kepemimpinan birokrasi feodal yang menekankan pada kekuasaan, pendekatan “*top down*” (dari atas) dan didasarkan pada hubungan formalitas sudah tidak relevan lagi karena saat ini tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat internal namun sudah bersifat global. (Antara, 2 Agustus 2009)

Menurut Fahmi (2012: 235) di dalam masyarakat terdapat dua jenis pemimpin yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, pemimpin informal adalah orang-orang yang tidak menduduki jabatan dalam pemerintahan, tetapi memiliki pengikut, dipatuhi dan ditaati sekelompok orang, biasa disebut dengan sesepuh masyarakat. Faktor yang sangat menonjol dalam diri pemimpin informal adalah kewibawaan yang ada pada dirinya itulah yang diikuti, dipatuhi, ditaati oleh masyarakat. Kewibawaan terbentuk dari unsur-unsur yang bersifat rasional dan kejiwaan, unsur kejiwaan misalnya kelebihan dalam hal resiko (pikiran), fisik dan segalanya, sedangkan kejiwaan adalah meliputi budi pekerti dan kesederhanaan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Moenir bahwa pemimpin formal adalah orang-orang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemimpin formal di tingkat desa adalah seorang kepala desa yang diangkat berdasarkan surat keputusan instansi yang berwenang. Kepala desa adalah kepala organisasi perintah desa yang melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Terkait pendapat di atas maka dapat pula ditentukan kepemimpinan formal di Desa Pasir Panjang adalah pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa, dan dalam melaksanakannya tugas-tugas pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, kepala urusan, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang bertugas mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Desa merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di daerah Kabupaten atau kota. Dalam pasal 200 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa “dalam pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. Kemudian pasal 202 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengertian pemerintahan desa itu sendiri menurut pasal 1 angka (6) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam lingkup kepemimpinan desa, maka dalam kepemimpinan Kepala Desa diarahkan untuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi pemerintah desa. Gaya kepemimpinan dari seorang kepala Desa bertanggungjawab menjalankan tugas pokok pemerintahan. Dalam menjalankan tugas tersebut mesti dilaksanakan secara merata pelayanan publik kepada publik yang bermutu.

Mukhammad Aras dan Samihah Khalil Halim (2013) dalam “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik”. Gaya kepemimpinan dalam birokrasi pelayanan publik sangat berpengaruh dalam menentukan hasil prestasi kerja dalam melakukan pelayanan publik kepada publik. Karena itu gaya kepemimpinan dalam birokrasi suatu institusi pemerintah desa untuk melaksanakan pelayanan publik kepada publik. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang menentukan kejayaan menjalankan organisasi birokrasi pemerintah desa. Organisasi birokrasi pemerintah desa berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada publik yang berwujudkan melalui penerapan gaya kepemimpinan suatu organisasi desa. Oleh sebab itu pemberian pelayanan publik secara bermutu kepada publik bergantung pada prestasi kerja gaya kepemimpinan suatu organisasi.

Desa Pasir Panjang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Dengan jumlah penduduk 1558 jiwa dengan rincian sebagai berikut: Laki-laki berjumlah 848 jiwa dan perempuan

berjumlah 710 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat dua golongan besar penduduk desa Pasir Panjang yaitu kaum bangsawan dan kaum *etete* (masyarakat biasa), yang perbandingannya mencapai 2:1 dimana dua orang kaum *etete* (masyarakat biasa) sementara terdapat satu kaum bangsawan (*aha madiata*).

Perbandingan yang cukup signifikan antara kaum bangsawan dengan *etete* (masyarakat biasa) tidak lantas membuat kaum *etete* (masyarakat biasa) sebagai pemegang posisi strategis di desa Pasir Panjang, sebaliknya kaum bangsawanlah yang menduduki posisi strategis. Idealnya ketika perbandingan dua golongan besar antara kaum bangsawan (*aha madiata*) dengan *etete* (masyarakat biasa) sebagai perbandingan terbesar (mayoritas) akan menempati posisi strategis dalam pemerintahan desa Pasir Panjang, lebih lagi bila mengingat proses pemilihan kepala desa di wilayah Manggarai Barat yang dilakukan secara langsung termaksud desa Pasir Panjang seolah menepis ungkapan bahwa *etete* (masyarakat biasa) tidak bisa memegang posisi strategis pemerintahan desa.

Regenerasi pemerintahan desa termasuk pula aparat desa juga terlihat masih satu arah, dominasi dalam kedudukan dan sektor-sektor strategis desa juga seolah mutlak tak pernah berubah, hanya dipimpin oleh mereka yang memiliki kasta tinggi dalam hal ini kaum bangsawan. Dengan berkembangnya pendidikan dewasa ini sistem feodalisme yang ada di masyarakat masih terus berkembang karena pemikiran dari masyarakat itu sendiri masih beranggapan bahwa yang patut dan pantas memegang posisi pemerintahan adalah mereka yang mempunyai keturunan bangsawan. Kaum bangsawan ini dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi dari rakyat biasa. Hal demikian mengesankan adanya kekuasaan dan

kekuatan yang bermuara pada satu kaum atau golongan yang regenerasinya terjadi pada satu lingkaran kesan dan penafsiran yang tersirat pada adanya feodalisme kepemimpinan yang masih berlangsung dalam regulasi dan mekanisme pemerintahan desa. Sebagian besar aparatur desa baik dari bawahan sampai kepala desanya berasal dari kaum bangsawan.

Pemimpin feodalistik beranggapan bahwa sumber kekuasaan pemerintahannya berasal dari kekayaan, jabatan, keturunan yang lebih tinggi dari *etete* (masyarakat biasa), bukan dari masyarakat yang dipimpin. Sumber tersebut bisa berasal dari Tuhan, Dewa, atasan, atau lembaga yang lebih tinggi daripada lembaga yang dipimpin. Pengabdian pemimpin ini bukanlah kepada masyarakat atau bawahan yang dipimpin, tetapi kepada struktur atau orang yang dia anggap memiliki kekuasaan yang lebih besar. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin tinggi pula kedudukannya dalam suatu strata atau pelapisan sosial. Disini jelas, bahwa pemimpin seperti ini memandang orang atas dasar besarnya kekuasaan yang dimiliki sehingga terjadi pengelompokan-pengelompokan ke dalam suatu bentuk strata sebuah pandangan khas dari paham feodalisme.

Ada beberapa ciri pemimpin berjiwa feodal pada pandangan Mochtar Lubis, yaitu: Atasan atau pemimpin tidak pernah salah, atasan atau pemimpin tidak boleh dikritik, atasan atau pemimpin tidak mau mendengar suara dari bawah. Jiwa feodal manusia Indonesia wujud dalam hubungan kepemimpinan dalam banyak instansi di Indonesia, baik instansi pemerintah maupun perusahaan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti tentang kepemimpinan feodal bahwa seorang pemimpin yang memiliki jiwa feodal akan menggunakan

kekuasaan yang ada padanya mengendalikan bawahan. Pemimpin seperti ini akan menggunakan hubungan komunikasi searah, yaitu komunikasi atas-bawah. Artinya yaitu Pemimpin akan mengambil keputusan tanpa mengajak bawannya berdialog. Sehingga hubungan dialogis-partisipatif akan mati pada lingkungan masyarakat feodalisme seperti ini di masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Memang, dalam pengambilan keputusan pemimpin akan meminta bawahannya untuk memberikan informasi. Akan tetapi, Bawahan akan memberikan informasi pada saat pemimpin meminta. Setelah informasi terkumpul, pimpinan akan mengolah informasi tersebut dengan caranya dan pada akhirnya mengambil keputusan seorang diri tanpa melibatkan bawahannya apalagi masyarakat yang dipilihnya. Bawahan hanya akan dikomunikasikan mengenai keputusan yang telah diambil, bukan diminta untuk mendiskusikan bersama keputusan yang akan diambil berdasarkan informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan.

Kepemimpinan dikenal oleh masyarakat Desa Pasir Panjang sekitar tahun 1907, diawali dengan membentuk “Kepala *Kampoh*”. “Kepala *Kampoh*” dalam bahasa suku Bajo adalah Kepala Kampung, yang secara luas memiliki artian pemimpin tertinggi masyarakat yang menentukan segala urusan didesa pasir panjang. Bagi masyarakat kata-kata atau perintah dari “Kepala *Kampoh*” merupakan suatu keharusan yang harus disegani, karena masyarakat sangat meyakini apapun yang diperintahkan adalah hal yang paling baik untuk mereka dan kelangsungan desa.

Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang warga Bapak Baso bahwa Semua urusan di desa pasir panjang ini diputuskan oleh Kepala *kampoh* harus kita ikuti, karena itu bertujuan untuk ketentraman dan kedamaian masyarakat desa.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pemimpin bagi masyarakat desa pasir panjang adalah orang yang berkusa atau memiliki wewenang yang sangat kuat atau absolut. Artinya kekuasaan penuh yang tidak bisa ditentang oleh segenap masyarakat desa pasir panjang. Akan tetapi yang menjadi pemimpin pada masyarakat desa pasir panjang tidaklah sembarang, melainkan memiliki penentuan yang tertentu.

Dari uraian di atas jelaslah jika pemimpin itu ditentukan oleh kekayaan, karena dengan kekayaan yang berlimpah maka akan memiliki masa yang banyak dan pengaruh yang sangat besar. Istilah mengenai hal tersebut di Desa Pasir Panjang dikenal dengan tiga istilah, yaitu “*Aha Sugih*”, *Aha Etete*”, *Aha Madiata*”. Untuk lebih mudah memahami hal tersebut berikut penjabarannya sebagai berikut:

1. *Ah Sugih* (Orang Kaya), pemimpin di desa Pasir Panjang dari kalangan yang kaya karena memiliki kekuasaan dan sangat dihargai oleh masyarakat setempat.
2. *Aha Etete* (Buruh Neleyan), orang yang bekerja untuk mendapatkan upah dari *aha sugih* (orang kaya), yang hidup dan matinya mengabdikan untuk orang kaya.
3. *Aha Madiata* (Orang Besar atau Tinggi), orang yang sangat disegani dikalangan masyarakat setempat.

Namun dalam perjalanan kepemimpinan di desa Pasir Panjang pada saat itu, terjadi suatu hal yang berbeda dari kebiasaan adatnya yaitu orang yang kaya atau aha sugih saja yang pantas memimpin desa tersebut, lahir satu kepemimpinan yang berasal dari masyarakat etete yaitu bapak Sahbudeng bisa menjadi kepala kampoh, atas keinginan pengikutnya, dan adanya penyatuan atau keinginan dari beberapa orang kaya yang menginginkan bapak Sahbudeng menjadi kepala kampoh, karena dilihat dari karismanya, namun itupun tidak berlangsung lama, karena ada desakan dari aha sugih yang memonopoli semua aspek kehidupan masyarakat desa pasir panjang yang tidak menginginkan bapak Sahbudeng yang dari aha etete memimpin desa tersebut, belajar dari pengalaman tersebut maka ada dorongan untuk lebih tegas lagi dikalangan aha sugih guna mengambil alih kekuasaan di desa Pasir Panjang maka dibuatlah satu aturan yang otoriter sehingga orang kaya sajalah yang berhak memimpin.

Dengan demikian masih adanya kepemimpinan berfaham feodalisme yang berlangsung dalam struktur pemerintahan desa Pasir Panjang, maka menjadi perlu dilakukan penelitian tentang “Feodalisme Kepemimpinan Tinjauan Sosiopolitik Masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat”.

Alasan diangkatnya masalah ini adalah adanya perbedaan yang mencolok antara kaum bangsawan (*aha madiata*) dengan kaum *etete* (masyarakat biasa) di dalam struktur pemerintahan di desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disusun di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk feodalisme kepemimpinan pada masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat?
2. Bagaimanakah implikasi feodalisme kepemimpinan pada masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat?
3. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap sistem kepemimpinan feodalisme pada masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk feodalisme kepemimpinan pada masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mengetahui implikasi feodalisme kepemimpinan pada masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap sistem kepemimpinan feodalisme pada masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang gaya kepemimpinan dan pengaruhnya pada pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi kemanfaatan praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Perda (Peraturan Daerah), bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada umumnya dan Desa Pasir Panjang yang merupakan bagian dari Kabupaten Manggarai Barat khususnya.

b. Peneliti

Sebagai kalangan akademis, penulis memperoleh informasi tentang bagaimana bentuk feodalisme kepemimpinan dan respon masyarakat terhadap feodalisme kepemimpinan tersebut.

c. Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dan respon masyarakat terhadap kepemimpinan pada masyarakat komodo, sehingga diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya memajukan desa dapat menyeluruh tanpa terbatas kelas atau status sosial dalam masyarakat.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Feodalisme: Stuktur kekuasaan yang berdasarkan kekayaan.
2. Kepemimpinan: Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi individu atau kelompok melalui suatu proses komunikasi supaya individu atau kelompok tersebut bertindak berbuat sesuai yang diinginkan guna mencapai tujuan bersama atau tujuan yang telah ditentukan.
3. Feodalisme Kepemimpinan: Seseorang yang ditunjuk menjadi seorang pemimpin yang berdasarkan kekayaan bukan dilihat dari kemampuan yang dimiliki.
4. Sosiopolitik: Hubungan antara negara dan masyarakat untuk menganalisis tren sosio-politik yang sedang terjadi.
5. Desa: Sekelompok masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.
6. Desa Pasir Panjang: Desa Pasir Panjang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan dan pemimpin berasal dari kata “pimpin”, yang mengandung beberapa arti, yang erat kaitannya dengan pengertian memelopori, dibagian depan, menuntun, membimbing, mendorong, mengambil inisiatif, bergerak lebih awal, mendahului, memberi contoh, menggerakkan orang lain, mengarahkan orang lain, memerintah orang lain dan sebagainya. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin, yang artinya membimbing atau menentukan dan kata benda pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan orang-orang ke tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin. (Aries Djaenuri, 2015: 7)

Adapun pengertian kepemimpinan menurut Prof. F. P. Brassor (adalah proses dimana seorang melaksanakan memberi petunjuk-pengaruh, pembinaan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain agar memilih atau mempengaruhi pekerjaan orang lain agar memilih atau mencapai maksud dan tujuan tertentu” (*leadership is the process by which an executive directs, guides or influences the work of others in choosing and attaining particular goals or objectives*).

Dari pendapat yang dikemukakan Pamudji dan Prof. F.P. Brassor tentang pengertian kepemimpinan di atas, terdapat kesamaan dimana kepemimpinan

adalah kemampuan untuk memberi petunjuk, pengaruh, mempengaruhi atau menggerakkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki.

Dengan demikian, esensi dari kepemimpinan hakikatnya meliputi beberapa unsur yaitu, pemimpin atau orang yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain; pengikut yang dapat dipengaruhi baik oleh ajakan, bujukan, anjuran, perintah, instruksi, paksaan dan bentuk lainnya; adanya tujuan yang hendak dicapai.

2. Macam-macam Pemimpin

Dalam berbagai kepustakaan dikenal jenis pemimpin yaitu masing-masing menangani bidang garapannya sendiri-sendiri. Pada dasarnya secara garis besarnya ada dua macam pemimpin yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. kepemimpinan formal ialah kepemimpinan yang memimpin organisasi formal seperti perusahaan, lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif), organisasi militer, dan sebagainya. Pemimpin formal ialah seseorang yang oleh organisasi tertentu dipilih sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memegang suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pemimpin ini sering dikenal dengan sebutan kepala.

Kepemimpinan informal adalah yang dasarnya tidak dipilih atau diangkat secara formal. Seseorang menjadi pemimpin informal kalau ia diakui mempunyai keunggulan fisik, keunggulan psikologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diakui oleh para anggota organisasi. Karena memiliki sejumlah kualitas unggul,

dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Dalam organisasi formal, pemimpin informal tidak mempunyai wewenang untuk memberi perintah dan menghukum para anggota organisasi. (Wirawan, 2013)

Selanjutnya Wirawan (2013) menjelaskan bahwa pemimpin formal dan informal memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri pemimpin formal yaitu: (a) berstatus sebagai pemimpin formal atau resmi (disahkan dan diangkat) selama masa jabatan tertentu, atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang, ada legitimasi, (b) sebelum pengangkatan, harus memenuhi beberapa persyaratan formal tertentu terlebih dahulu, (c) diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, (d) bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal, dan dapat dimutasikan. (e) bila melakukan kesalahan-kesalahan, akan dikenakan sanksi dan hukuman.

Sedangkan ciri-ciri pemimpin informal yaitu: (a) tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin, (b) masyarakat menunjuk dirinya, dan mengakuinya sebagai pemimpin, (c) status kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima dirinya, (d) tidak dapat dimutasikan. (e) tidak pernah mencapai promosi. (f) tidak memiliki atasan.

3. Teori Kepemimpinan

Banyak teori-teori tentang kepemimpinan antara lain yang dikemukakan oleh Ralp M. Stogdill dalam Djaenuri (2015: 11) antara lain dikemukakan bahwa

teori-teori berkenan dengan kepemimpinan ada beberapa seperti yang dirangkumkan, sebagai beriku:

- a. Teori Sifat (*traits theory*). Teori ini melihat dari sudut pandang bahwa kepemimpinan itu untuk berhasilnya seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat tertentu, ciri-ciri atau perangai tertentu. Sifat tersebut dijadikan pedoman untuk mengembangkan kepemimpinan. Diantaranya dikemukakan bahwa pemimpin itu dianggap memiliki sifat-sifat yang dianggap sejak lahir dan menjadi pemimpin karena memiliki bakat menjadi pemimpin sejak lahir. Maka teori ini disebut juga teori genetis, yang disimpulkan bahwa pemimpin itu dilahirkan tidak dibentuk (*leaders are born and not made*).
- b. Teori Lingkungan (*enviromental theory*). Teori ini berpendapat bahwa munculnya pemimpin itu karena keadan, tempat dan waktu atau pemimpin-pemimpin lahir karena situasi dan kondisi yang memungkinkan atau kondusif untuk itu. Kebangkitan dan kejatuhan seseorang pemimpin itu dikarenakan oleh situasi dan kondisi, apabila ia menguasai situasi dan kondisi maka ia akan dapat menjadi pemimpin.
- c. Teori Pribadi dan Situasi (*personal-situational theory*). Teori ini berusaha menjelaskan kepemimpinan sebagai akibat dari seperangkat kekuatan yang tunggal. Teori ini pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan produk dari terkaitnya tiga faktor: (a) perangai (sifat-sifat) pribadi dari pemimpin; (b) sifat dari kelompok dan anggota-nggotanya; dan (c) kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompok.

- d. Teori Interaksi dan Harapan (*interaction-expectation theory*), teori ini mendasarkan diri pada variabel-variabel: aksi, reaksi, interaksi, dan perasaan. Teori ini berasumsi bahwa semakin terjadi interaksi dan partisipasi dalam kegiatan bersama semakin meningkat perasaan saling menyayangi atau menyukai satu sama lain dan semakin memperjelas pengertian atas norma-norma kelompok.
- e. Teori *Humanistic* (*humanistic theory*). Teori ini mendasarkan diri pada pendapat bahwa manusia karena sifatnya adalah *organism* yang dimotivasi, sedangkan organisasi karena sifatnya adalah tersusun dan terkendali. Fungsi kepemimpinan adalah membuat organisasi sedemikian rupa sehingga memberikan sedikit kebebasan atau kelonggaran kepada individu untuk mewujudkan motivasinya sendiri yang potensial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan pada saat yang bersamaan memberikan sumbangan pada pencapaian tujuan organisasi.
- f. Teori Tukar Menukar (*exchange theory*). Teori ini mendasari diri pada pendapat bahwa interaksi sosial menggambarkan suatu bentuk tukar menukar dalam mana anggota-anggota kelompok memberikan kontribusi dengan pengorbanan-pengorbanan mereka sendiri dan menerima imbalan-imbalan dengan pengorbanan-pengorbanan kelompok atau anggota-anggota yang lain.

Demikianlah beberapa teori mengenai kepemimpinan, yang pada dasarnya mengakui bahwa munculnya seorang pemimpin oleh karena faktor-faktor lingkungan dan faktor-faktor individu yang berinteraksi menghasilkan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang cocok untuk situasi dan kondisi tertentu.

4. Tipe dan Gaya Kepemimpinan

Malayu Hasibuan (2008: 170) mendefinisikan bahwa tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola atau jenis kepemimpinan, yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Gaya kepemimpinan bertujuan untuk mendorong gairah kerja, kepuasan kerja, dan produktivitas kerja karyawan yang tinggi, agar dapat mencapai tujuan organisasi yang maksimal.

Keberhasilan seorang pemimpin dalam organisasi baik publik maupun privat juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya. Seorang pemimpin harus paham benar tentang kemampuannya sendiri, latar belakang pengikutnya dan situasi yang ada, bersamaan dengan itu pemimpin dapat memilih cara berperilaku dalam mempengaruhi bawahannya melekat pada diri pemimpin sehingga pada kenyataannya seorang pemimpin tidak sadar akan gaya yang diterapkan dalam mempengaruhi bawahan atau pengikutnya.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap gaya kepemimpinan itu perlu untuk seorang pemimpin agar dapat dijadikan dasar pijakan dalam mempengaruhi bawahan atau pengikutnya. Max Weber menganalisa tentang kepemimpinan dari sudut kejadiannya dan membagi pimpinan menjadi tiga tipe, yaitu:

a. Tipe Karismatik

Pemimpin disini diangkat berdasarkan atas suatu kepercayaan bahwa pemimpin itu dapat memberikan berkah karena “tuah atau mantra”nya, keselamatan untuk melindungi rakyat, karena dianggap memiliki ilmu gaib. Kepemimpinan semacam ini tidak hanya terdapat dalam masyarakat yang primitif,

tetapi justru pada masyarakat modernpun masih terdapat kepercayaan akan adanya pemimpin-pemimpin yang dianggap mempunyai “karisma” itu.

Sukses dan prestasi yang dicapai oleh seorang pemimpin menimbulkan rasa kagum dan terpesona, sehingga timbul pikiran-pikiran yang menyatakan bahwa mustahil bila pimpinan itu tidak memiliki “ilmu gaib”. Tokoh-tokoh pemimpin inilah yang menjadi “diktator”

b. Tipe Tradisional

Pemimpin semacam ini adalah pemimpin yang dipilih atas dasar kebiasaan turuntemurun atau tradisi. Misalnya pada jaman feodal kedudukan: raja, bupati bahkan lurah di desapun orang cenderung memilih turunan atau sanak famili dari pejabat lama.

Sistem ini tidak diperhitungkan kecakapan calon pemimpin, yang terpenting adalah melestarikan tradisi, dan pada umumnya rakyat begitu yakinnya akan kebaikan tradisi yang dianut. Melanggar tradisi berarti melanggar adat, sehingga jarang sekali rakyat biasa berani melanggar kebiasaan itu.

c. Tipe Rasional Legal

Pemimpin seperti ini dipilih berdasarkan dua prinsip, yaitu rasional dan legal. Rasional bila pengangkatan itu berdasarkan atas landasan kecakapan, pengalaman, atau pendidikan dari yang bersangkutan dan legal, karena juga berlandaskan hukum atau peraturan yang berlaku.

Dengan demikian dapat terjadi, seorang yang diangkat menjadi pemimpin karena dirujuk atau ditetapkan dari atas, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut tadi yaitu kecakapamn, pengalaman, pendidikan, jasa-jasa,

pertimbangan politis dan sebagainya. Misalnya: pemilihan pemimpin organisasi-organisasi, jabatan-jabatan pemerintah dan sebagainya.

Tiga tipe jenis pemimpin tersebut tentu saja masing-masing mempunyai segi negatif dan positifnya. Yang jelas ialah bahwa suatu “cara” tidak selalu menentukan isi. Sebab yang dianggap terpenting dari segi ini ialah bagaimana “kualitas” orang (*person*) yang terpilih menjadi pemimpin itu.

Sebaliknya meskipun seorang memiliki persyaratan yang memadai untuk menjadi pemimpin belum tentu memadai menjadi pemimpin karena faktor “kesempatan”. Sebaliknya orang yang kurang memiliki persyaratan untuk menjadi pemimpin karena “adanya kesempatan” maka jadilah ia seorang pemimpin. Ternyata faktor kesempatan juga memegang peran penting.

Sehubungan dengan itu Ivancevich, dkk (2008: 209) mengatakan bahwa kepemimpinan kharismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada fisi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Dengan kata lain seorang pemimpin kharismatik memiliki *mysterious quality* berupa keyakinan yang luar biasa dari pengikutnya tanpa keraguan sedikitpun atas kualitas dan kemampuannya dalam mengkomunikasikan ide-ide dan nilai-nilai yang dikembangkan dengan cara yang jelas dan menawan.

5. Sifat, Watak, dan Perangai Kepemimpinan

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana berkenaan dengan sifat-sifat yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin dan telah banyak pula

sederetan sifat, watak dan tingkahlaku yang dikemukakan yang berbeda antara satu sarjana dengan yang lain.

Aries Djaenuri (2015) menjelaskan bahwa ada beberapa sifat yang dipandang sebaiknya dimiliki seorang pemimpin, yaitu:

- a. Toleransi (*Toleransi*). Seorang pemimpin yang berhasil tidak menutup diri terhadap berbagai ide dan masukan dari pihak luar.
- b. Kestabilan (*Stability*). Seorang pemimpin yang sukses digambarkan memiliki keuletan dan kestabilan emosi.
- c. Keterbukaan (*Openness*). Seorang pemimpin bersifat terbuka, dalam arti dapat diajak diskusi dan jujur atau *fair play* dalam segala urusan, bijaksana dalam pengambilan keputusan dan terbuka terhadap kritik dan saran.
- d. Teguh Pendirian (*Firmness*). Seorang pemimpin yang berhasil menunjukkan kemahiran dalam menilai situasi dan kondisi secara keseluruhan, tajam dalam memilih dan membedakan fakta dan cermat dan realistis dalam pengambilan kesimpulan dan tidak mudah berubah dalam pendirian.
- e. Kesungguhan (*Serious Mindsetness*). Seorang pemimpin mempunyai kesungguhan, dalam arti keseriusan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan organisasi yang dipimpinnya di masa datang.
- f. Ketenangan (*Tranquility*) seorang pemimpin tenang dalam menghadapi segala permasalahan.
- g. Keyakinan (*Acceptance*). Seorang pemimpin berhasil memimpin jika dipercaya dan diterima oleh seorang yang dipimpinnya, baik dari bawahan, mitra kerja maupun masyarakat.

- h. Kemampuan Menganalisis (*Analytical Ability*). Seorang pemimpin akan mampu menganalisis permasalahan yang kompleks sekalipun, menguasai dengan baik, permasalahan serta mampu membuat keputusan cermat dan tepat dan berani mengambil resiko.
- i. Inisiatif dan Dorongan (*Iniciatif and Drive*) seorang pemimpin mempunyai daya untuk membuat sesuatu yang baru atau ide baru untuk menyelesaikan pekerjaan serta mempunyai kemampuan untuk mendorong bawahan , mitra, dan masyarakat.
- j. Terarah (*Direction*). Seorang pemimpin cakap dalam memberikan pengarahan, dalam arti mampu memberikan pengarahan secara dan gamblang mengenai suatu tugas yang harus dikerjakan.
- k. Tanggap dan Terampil (*Acuteness*). Seorang pemimpin cepat memahami persoalan, situasi dan kondisi lingkungan dan cermat serta cepat dalam pengambilan keputusan.
- l. Cakap dan Luwes (*Capacity and Flexibility*). Seorang pemimpin memiliki pengetahuan, wawasan, pengalaman yang dibutuhkan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mampu untuk segera menyesuaikan atas perubahan situasi dan kondisi serta perkembangan persoalan di lapangan.
- m. Melayani masyarakat (*Publik Services*). Seorang pemimpin selalu menyediakan waktunya untuk melayani dan mengabdikan untuk kepentingan anggota organisasi dan masyarakat untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi yang dipimpinnya.

Sifat-sifat kepemimpinan di atas sering dijumpai di literatur-literatur Barat maupun Timur dan juga yang telah dilakukan terhadap pemimpin yang berhasil, walaupun juga harus diakui bahwa situasi dan lingkungan juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan seorang pemimpin.

6. Kepemimpinan Feodal

Pemimpin bergaya feodal ini cenderung menjadi otoriter. Mereka mendefinisikan pemimpin sebagai pribadi yang memiliki kekuasaan. Pola kepemimpinannya seperti ini sangat membudaya di Indonesia.

Pemimpin otoriter-feodalistik ini beranggapan bahwa sumber kekuasaannya berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, bukan dari masyarakat yang harus dilayani. Sumber tersebut bisa berasal dari Tuhan, dewa, atasan, atau lembaga yang lebih tinggi dari pada lembaga yang dipimpinnya. Pengabdian pemimpin ini bukanlah kepada masyarakat atau bawahan yang dipimpinnya, tetapi kepada struktur atau orang-orang yang dia anggap memiliki kekuasaan yang lebih besar. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin tinggi pula kedudukannya dalam suatu strata atau struktur. Disini jelas, bahwa pemimpin jenis ini memandang orang atas dasar besarnya kekuasaan yang dimiliki. Orang dikelompokkan ke dalam strata-strata, sebuah pandangan khas dari paham feodalisme.

a. Pengertian Feodalisme Kepemimpinan

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan

pada sistem politik di Eropa pada abad pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatri dan kelas bangsawan lainnya (*vassal*) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut *feif* atau dalam bahasa latin, *feodum*) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau *lord*). (Wikipedia, 2017)

Menurut Sigit Djamiko (2013) dalam bukunya Filsafat Sosial (dari Feodalisme Hingga Pasar Bebas) istilah “Feodalisme” diambil dari istilah latin “*feodom*” yang berarti *fief*. Jadi istilah feodalisme secara harfiah berarti suatu masyarakat yang diatur berdasarkan sistem *fief*, dengan kekuatan legal dan politis yang menyebarluas diantara orang-orang yang memiliki kekuasaan ekonomi. Di dalam buku ini juga, dijelaskan bahwa feodalisme itu berarti kaum bangsawan menduduki posisi kepemilikan yang efektif atas lahan.

Dari beberapa pengertian tentang kepemimpinan feodal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan feodal adalah suatu kekuasaan yang dimiliki suatu kaum atas masyarakat yang mana kekuasaannya memberikannya hak istimewa.

b. Ciri-ciri Kepemimpinan Feodal

Pemimpin feodalisme di Desa Pasir Panjang sifatnya sama dengan kepemimpinan tradisional yang lebih mengedepankan kekuatan atau karisma seseorang sebagai pemimpin dari pada melihat dari segi kemampuan intelektualnya, jadi sifat yang menonjol dari feodalisme kepemimpinan ini adalah lebih bersifat kepemimpinan yang turun-temurun.

Malayu Hasibuan (2008: 200) menyebutkan ciri-ciri pokok dari cara-cara, feodal yaitu:

- 1) Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak.
- 2) Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi di dalam kelompok tersebut.

Untuk melengkapi ciri kepemimpinan ini, dapat dirujuk pendapat Mifta Thoha (2010: 49) tentang ciri-ciri pemimpin otokratis, yaitu:

- 1) Beban kerja organisasi pada umumnya ditanggung oleh pemimpin.
- 2) Bawahan, oleh pemimpin hanya dianggap sebagai pelaksana dan mereka tidak boleh memberikan ide-ide baru.
- 3) Bekerja dengan disiplin tinggi, belajar keras, dan tidak kenal lelah.
- 4) Menentukan kebijakan sendiri dan walaupun bermusyawarah sifatnya hanya penawar saja.
- 5) Memiliki kepercayaan yang rendah terhadap bawahan dan walaupun kepercayaan diberikan, di dalam dirinya penuh ketidakpercayaan.
- 6) Komunikasi dilakukan secara tertutup dan satu arah.
- 7) Korektif dan minta penyelesaian tugas pada waktu sekarang.

7. Analisis Teori

a. Perspektif Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar

manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

John Rawls dalam Stephen P. Robbins (2009), menegaskan dalam penelitiannya bahwa terdapat dua prinsip-prinsip keadilan, diantaranya yaitu:

- 1) *each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.*
- 2) a) *social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantaged and b) are attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.*

Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu.

Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang *fair* pada setiap orang untuk

mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

Pemikiran Rawls adalah upaya membentuk *Justice as Fairness* pada awalnya merupakan bagian dari pemikiran melihat realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat liberal. Ketimpangan selalu hadir dalam setiap masyarakat, bahkan masyarakat liberal, sosialis, apalagi dalam masyarakat yang hadir dalam rezim totalitarian. Perbedaan capaian seorang individu dalam masyarakat maupun dalam hidupnya sendiri, sangat ditentukan oleh tatanan alamiah yang hadir tanpa pernah sekalipun individu memilihnya. Terlahir dari golongan masyarakat kaya atau miskin, secara genetis tampan atau cantik atau tidak, terlahir dengan kulit berwarna gelap atau tidak merupakan tata alamiah yang tidak dapat dipungkiri kehadirannya. Kehadiran tata alamiah ini menyebabkan ada ketimpangan dalam kompetisi sosial, ekonomi, dan politik yang didapatkan oleh individu yang disebabkan oleh kondisi tersebut. (Stephen P. Robbins, 2009),

John Rawls dalam Stephen P. Robbins (2009), menawarkan konsep apa itu yang dianggap adil. Definisi “adil” oleh Rawls secara sederhana dijelaskan dalam suatu konsep yang disebut *Justice as Fairness*. Artinya, keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan bagi Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan

kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi.

Affirmative action adalah salah satu cara yang ditawarkan oleh Rawls sebagai bentuk praktis dari pengejawantahan konsep *justice as fairness*. *Affirmative action* dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang lebih pada individu-individu dalam masyarakat yang paling tidak diuntungkan dalam struktur sosial, kondisi politik, maupun struktur ekonomi.

Dilihat dari uraian tentang teori keadilan menurut John Rals di atas, maka dapat kita benturkan dengan keadaan masyarakat Komodo yang mana masih menggunakan sistem kepemimpinan feodal yang mana tidak memberikan kesempatan yang sama kepada individu lain untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi. Dalam hal ini kepemimpinan pada masyarakat Komodo khususnya Desa Pasir Panjang.

b. Realitas Sosial Masyarakat

Untuk memahami suatu masyarakat, tidak dapat dilakukan sekaligus secara menyeluruh. Sebab masyarakat terbentuk oleh berbagai aspek. Aspek-aspek itu merupakan suatu realitas yang menyusun masyarakat. Apabila masyarakat diibaratkan sebagai sebuah rumah, maka bagian-bagian yang menyusun adalah tiang, dinding, atap, pondasi, dan sebagainya.

Oleh karena itu merujuk kepada teori keadilan John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh.

Keadilan bagi Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi.

Dimana setiap orang yang memiliki kemampuan atau ahli dalam hal kepemimpinan, berhak untuk menjadi pemimpin dan dapat diganti apabila melakukan pelanggaran. Sehingga kepemimpinan feodal (kepemimpinan berdasarkan status kekayaan, kepemilikan tanah dll) seperti yang terjadi pada Masyarakat Komodo tidak berlanjut pada waktu yang akan datang.

8. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam kajian pustaka ini diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah sebagai pembandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengilhami penelitian ini, baik sebagai referensi, pembandingan maupun sebagai dasar pemilihan topik penelitian, diantaranya yaitu:

- a. Penelitian Edi Sunanto dan Ismanuddin (2014), tentang “ Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Bidang Layanan Sipil Di Desa Renjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu”.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap Pelayanan administrasi pemerintahan bidang layanan sipil di Desa Renjeng Kecamatan Losarang cukup kuat dan signifikan. Dalam hal ini dapat diukur berdasarkan beberapa variabel, diantaranya diukur berdasarkan dimensi-dimensi peran kepemimpinan menurut Pasalong (2008: 33-34) meliputi (1) peran mengambil keputusan, (2) peran mempengaruhi kepada bawahan, (3) peran memotivasi, (4) peran antar pribadi, dan (5) peran informasional. Diukur berdasarkan dimensi kualitas pelayanan publik menurut Kortel (dalam Rewansyah, 2011: 77-79) yaitu meliputi faktor-faktor (1) *Reliability* (kepercayaan, keandalan), (2) *Responsiveness* (ketanggapan, kepekaan), (3) *Assurance* (kepastian, jaminan keamanan), (4) *Emphaty* (kepedulian, empati, dan (5) *Tangible* (nyata terasa, berwujud). Diukur berdasarkan uji F, menunjukkan F hitung (19,046) > F tabel (7,08) > (4.00), maka jelas bahwa H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien itu berarti ($r \neq 0$). Atau dengan kata lain, bahwa variabel kepemimpinan kepala desa dapat meningkatkan variabel pelayanan administrasi pemerintahan bidang layanan sipil di Desa Renjeng Kecamatan Losarang, terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,485 antara kepemimpinan kepala desa dengan pelayanan administrasi pemerintahan bidang layanan sipil di Desa Renjeng Kecamatan Losarang.

- b. Penelitian Muhammad Aras dan Samihah Khalil (2013), “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kabupaten Indragiri Hilir Riau”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa dengan mutu pelayanan publik. Sampel kajian ditetapkan 17 desa, dan responden 646 orang dari 5780 orang pada 170 desa populasi tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui: angket dan dokumen. Angket digunakan untuk menelaah persepsi responden terhadap hubungan gaya kepemimpinan dengan mutu pelayanan publik. Dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai sumber dana yang menjadi faktor dana mempengaruhi variabel dependen.

Data kuantitatif dianalisis bagi menguji hipotesis hubungan gaya Kepemimpinan dan mutu Pelayanan publik digunakan ujian korelasi *Spearman rho* dan uji-*chi square*. Pengujian hipotesis pengaruh gaya Kepemimpinan dan faktor dana terhadap mutu Pelayanan publik digunakan teknik regresi dengan uji *t*, uji *F* dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada umumnya semua gaya kepemimpinan telah diterapkan oleh kepala desa dalam Kepemimpinannya. Namun dalam praktek kepemimpinan kepala desa menunjukkan bahwa gaya partisipasi merupakan gaya kepemimpinan mempunyai korelasi yang lebih tinggi daripada gaya instruksi, konsultasi dan delegasi. Gaya partisipasi kepemimpinan mempunyai korelasi yang tinggi ($r=0,780$) dalam memberikan mutu pelayanan kepada masyarakat oleh kepemimpinan kepala desa. Gaya kepemimpinan partisipasi kepala desa memiliki korelasi paling tinggi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa. Maka gaya partisipasi

yang diterapkan kepala desa merupakan gaya Kepemimpinan yang sudah umum dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada warga desa secara bermutu dan memuaskan.

Dikatakan bahwa sebanyak 62% merupakan kontribusi secara bersama-sama yang dijelaskan oleh variabel independen yaitu, Gaya instruksi, Gaya konsultasi, Gaya partisipasi, Gaya delegasi, dan Faktor dana terhadap variabel dependen Mutu pelayanan publik, Dengan perkataan lain dapat dijelaskan bahwa *koefisien determinasi* menunjukkan semua gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa mempunyai pengaruh terhadap mutu pelayanan, sehingga dengan pelayanan tersebut sebagai warga desa memperoleh pelayanan umum dari kepemimpinan kepala desa mereka sendiri.

Kepemimpinan kepala desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan desa mempunyai hubungan yang kuat dengan pemberian tugas pelayanan kepada masyarakat. Hubungan kepemimpinan kepala desa tersebut memiliki hubungan yang kuat dari semua gaya kepemimpinan yang mencakup gaya instruksi, konsultasi, partisipasi dan delegasi. Pelaksanaan pelayanan masyarakat desa dipengaruhi oleh kepemimpinan dari kepala desa. Pengaruh kepemimpinan terhadap mutu pelayanan tersebut diperlukan gaya kepemimpinan tertentu untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Gaya Kepemimpinan yang diterapkan kepala desa mengikuti kematangan bawahan. Kerana itu peningkatan pelaksanaan mutu pelayanan publik berhubungkait dengan kematangan staf dari gaya kepemimpinan yang diterapkan kepemimpinan kepala desa.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan mengikuti kematangan bawahan. Penerapan gaya kepemimpinan Kepala Desa yang memberikan pelayanan masyarakat desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti perspektif situational leadership yang meletakkan hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kematangan bawahan.

c. Penelitian Awang Anwaruddin (2009), “Transformasi Kepemimpinan Birokrasi”.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang transformasi kepemimpinan birokrasi, sebagai bagian dari upaya melakukan reformasi birokrasi secara sistemik.

Hasil penelitian ini menunjukkan reformasi birokrasi seyogyanya dilakukan berdasarkan suatu *grand strategy* yang mencakup seluruh sistem kelembagaan organisasi pemerintah. Dalam kaitan inilah tampaknya pemerintah perlu membentuk sebuah komisi reformasi perbaikan birokrasi, yang tugas utamanya merumuskan payung kebijakan reformasi tersebut.

Perumusan *grand strategy* reformasi dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap awal adalah melakukan analisis permasalahan yang ada di dalam tubuh birokrasi. Di samping itu, perlu juga melakukan kompilasi berbagai konsep tentang pembaharuan birokrasi, yang dikemukakan oleh para ahli melalui beragam media. Tahap penting dalam strategi tersebut adalah internalisasi dan sosialisasi dari rumusan yang telah disusun untuk melihat reaksi dari dalam dan luar lingkungan birokrasi, sebelum diterbitkan secara resmi.

Melakukan reformasi birokrasi dengan pendekatan sistemik berarti mencakup seluruh sub-sub sistem yang ada. Diantaranya yang cukup signifikan adalah perilaku kepemimpinan birokrasi. Kita tahu, karena pengaruh hierarki kekuasaan, implementasi kepemimpinan birokrasi banyak yang sudah bergeser dari model transaksional ke arah tradisional (*feudal*). Perilaku semacam inilah yang menuntut loyalitas total dari staf, mengembangkan nepotisme yang berujung korupsi, dan kental berbau politik kekuasaan.

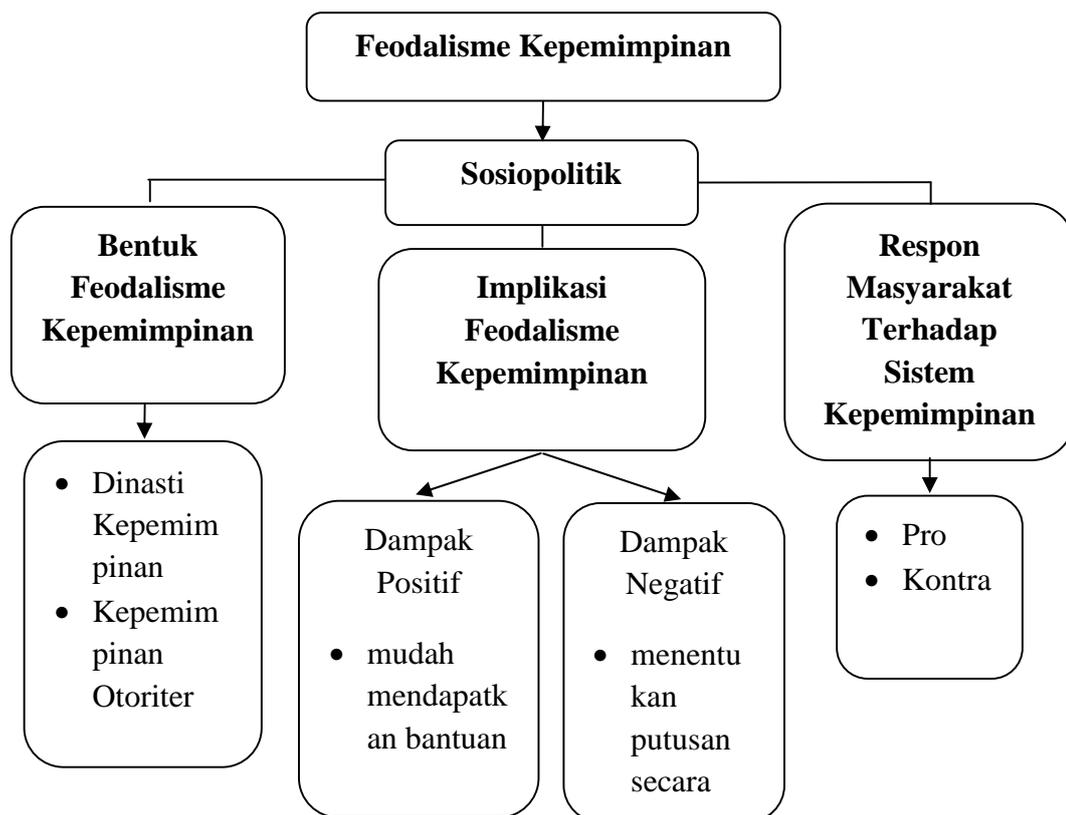
Untuk mengubah malpraktik perilaku kepemimpinan birokrasi perlu dilakukan transformasi perilaku pemimpin. Perubahan ini hanya berhasil apabila ada kemauan keras dari pelaku kepemimpinan, dibarengi dengan usaha mengembangkan diri tanpa henti melalui studi mandiri dan berbagai media pembelajaran. Bahkan, dikatakan oleh Haryanto (2008), terus berlanjut walaupun seorang pemimpin telah dianggap berhasil meningkatkan kompetensi kepemimpinannya. Artinya, ia telah berhasil mengubah karakter dan kemampuan kepemimpinannya dalam melaksanakan tugas dan mempengaruhi pegawai, sehingga menjadi teladan bagi lingkungannya, dan pada akhirnya merubah kondisi ekonomi, sosial, budaya kerja, dan spiritual seluruh komponen organisasinya.

B. Kerangka Konsep

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Kepemimpinan tidak terlepas dari bagaimana perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya sehingga berdampak pada perilaku masyarakat dan bagaimana

partisipasi masyarakat dalam kepemimpinan desa. Dalam sistem kepemimpinan feodal yang merupakan kepemimpinan yang dinilai kurang baik pada suatu masyarakat dapat dianalisis melalui bagaimana gaya kepemimpinan seseorang dan perilakunya dalam memimpin suatu masyarakat sehingga dalam kepemimpinannya, dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan atau tujuan-tujuan dari kepemimpinannya tersebut.

Berikut adalah kerangka konsep dari penelitian yang harapannya dapat memberikan gambaran tentang penelitian ini, yaitu:



Bagan 1: Kerangka Konsep Feodalisme Kepemimpinan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian sosial budaya yang dianalisis secara kualitatif, yang menurut Miles dan Huberman (2009: 15) merupakan penelitian yang menghasilkan data yang muncul berwujud kata-kata bukan angka, data itu mungkin telah dikumpulkan dengan aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Dengan kata lain penelitian ini sangat bergantung pada informasi yang didapat saat melakukan penelitian di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman (2009: 1-2), penelitian kualitatif merupakan sumber dari deskripsi luas dan berlandas kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat, dalam lingkungan pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, instrumennya adalah penelitian sendiri, berfungsi sebagai penetap fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dengan mencatat apa yang terjadi, melakukan analisis data terhadap berbagai kejadian yang ditemukan di lapangan, menafsirkan data dan membuat laporan penelitian.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. (John W. Creswell, 2010)

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama dua bulan.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama adalah peneliti. Selanjutnya perlu dikemukakan siapa yang menjadi informan atau partisipan atau narasumber sebagai sumber datanya, apakah Kepala Desa, Sesepeuh Desa, dan Tokoh Adat.

Emori (2012) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Penentuan informan dalam kualitatif yang digunakan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2016: 218) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu maksudnya, informan yang diambil oleh peneliti adalah orang-orang yang betul-betul mengetahui dan termasuk dalam struktur aparatur desa. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Informan penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu:

1. Informan Kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini kepala desa, mantan kepala desa dan para sesepeuh desa.
2. Informan Ahli yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dalam hal ini beberapa aparat desa dan kaur-kaur desa.

3. Informan Biasa, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti dalam hal ini adalah warga desa pasir panjang dan para tokoh adat.

Berikut nama-nama informan dalam penelitian, yaitu:

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	Muhamammad Tayeb	Guru Sekolah Dasar	41
2	Mardin	Nelayan	33
3	Muhammad Arok	Sekretaris desa	36
4	Bapak Abas	Ketua Komite	34
5	Bapak Herdi	Guru SMP	27
6	Ibu Mariyani	Ibu rumah tangga	30
7	Bapak Mustakim	Nelayan	33
8	Bapak Mansur	Pemandu Wisata	33

Tabel 1: Nama-nama Informan

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini tentang feodalisme terkait dengan dinasti kepemimpinan dan kepemimpinan otoriter pada masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data (Burhan Bungin, 2013: 71). Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, maka peneliti mulai tahap awal penelitian sampai hasil penelitian

ini seluruhnya dilakukan oleh peneliti. Selain itu untuk mendukung tercapainya hasil penelitian maka peneliti menggunakan alat bantu berupa lembar observasi, panduan wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Lembar observasi, berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Panduan wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.
3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data menurut Burhan Bugin (2013: 129) yaitu:

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada obyek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan dalam membantu mengungkapkan data yang diharapkan, membantu memberi keterangan sebagai pelengkap dan bahan pembandingan (Bungin, 2013: 129). Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara atau observasi sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi sumber data terdiri dari sumber informan kunci, informan ahli dan informan biasa.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data dalam penelitian ini dimana penelitian atau pengamatan melihat situasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengamati dari dekat dalam upaya mencari dan menggali data melalui pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap obyek yang diteliti. Menurut James dan Dean dalam Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 113), observasi adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian

serta mencatat penemuan yang menghasilkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis. Terdapat dua jenis observasi, yaitu:

- a) Observasi Partisipan, yaitu kegiatan observasi dimana orang yang mengobservasi atau observer turut berperan sebagai orang yang diobservasi.
- b) Observasi Non Partisipan, yaitu kegiatan observasi dimana observer tidak berperan sebagai observee tapi hanya sebagai observer semata.

Adapun teknik observasi yang digunakan dalam peneliti ini adalah observasi non partisipan, dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis, dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan yang berkaitan dengan feodalisme kepemimpinan dalam pemerintahan desa di Desa Pasir Panjang Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

2. Wawancara

Menurut James dan Dean dalam Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 130), wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi disamping mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat dan sebagainya. Wawancara memiliki sifat yang lues pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan subyek sehingga segala

sesuatu yang ingin diungkapkan dapat digali dengan baik. Wawancara terbagi atas dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

- a) Wawancara terstruktur adalah peneliti dapat mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, dan berapa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan
- b) Wawancara tidak terstruktur atau bebas adalah peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, tetapi hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur yang bersifat luwes, dimana susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dilakukan, pengumpulan data dengan teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan baik itu dari subjek maupun informasi yaitu Kepala Desa, Sesepuh Desa, dan Tokoh Adat yang ada di Desa Pasir Panjang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berupa dokumen, baik dokumen tertulis maupun hasil gambar. Menurut Lexy J. Moleong dalam Pajjaluddin dan Ermalinda (2013: 135), dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Data yang diperoleh dari dokumen ini biasa digunakan untuk melengkapi bahkan memperkuat data dari hasil wawancara.

4. Partisipatif

Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, baik keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Pengamatan ini mempunyai maksud bahwa pengumpulan data melibatkan interaksi sosial antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan dalam suatu lokasi, selama pengumpulan data berlangsung harus dilakukan secara sistematis tanpa menempatkan diri sebagai peneliti.

Berikut bagaimana data yang ingin didapat dalam penelitian ini, yaitu:

Observasi	<ul style="list-style-type: none"> • Foto visi-misi Desa. • Papan informasi Desa. • Kantor Desa • Kegiatan perhari
Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan kepala desa. • Tugas aparat-aparat desa. • Tugas kaur-kaur desa. • Jumlah aparat desa. • Masukan dana perbulan. • Kegiatan perhari
Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Gambar visi-misi desa. • Data nama penduduk. • Jumlah KK. • Data-data pajak. • Data nama-nama aparat. • Foto kegiatan. • Data dana perbulan • Kehadiran
Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat. • Petugas desa

Tabel 2: Data Yang Ingin Didapat

H. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2016: 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, penjabaran dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 246), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yaitu cara yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya tanpa bermaksud merubah kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan. Objek yang akan direduksi dalam hal ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait hal tentang feodalisme kepemimpinan dalam pemerintah desa di Desa Pasir Panjang.

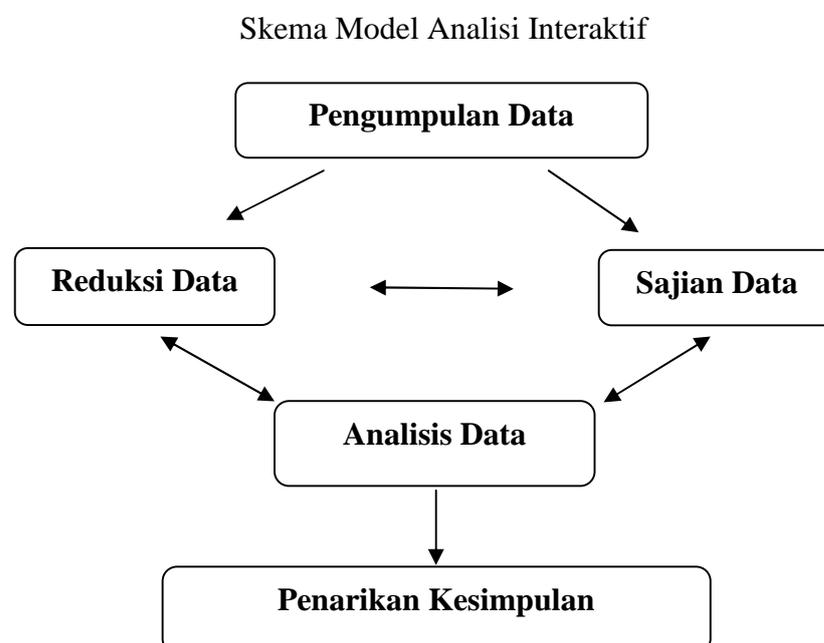
2. Tahap Penyajian Data

Tahap kedua dari prosedur analisis data adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang menyatakan adanya kemungkinan

penarikan kesimpulan bahkan sampai pada pengambilan tindakan. Data yang disajikan pada tahapan ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang feodalisme kepemimpinan dalam pemerintahan desa di Desa Pasir Panjang.

3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan setelah dilakukannya reduksi data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan adalah membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah dilakukan reduksi serta penyajian dari data hasil penelitian tentang feodalisme kepemimpinan dalam pemerintahan desa di Desa Pasir Panjang. Berdasarkan uraian di atas maka langkah analisis data ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Skema Model Analisis Interaktif (Isma Sirajuddin, 2017)

I. Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2016: 267) uji keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah, valid, reliable dan obyektif. Data dapat dikatakan valid apabila data tidak mengalami perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data dapat dilakukan dengan cara uji kredibilitas. Menurut Sugiyono (2016: 270) dalam melakukan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali kelapangan kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah di cek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan uraian peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Trianggulasi

Trianggulasi dalam pemeriksaan keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi teknik, trianggulasi sumber, dan trianggulasi waktu. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Trianggulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas tentang kepemimpinan otoriter dalam pemerintahan desa maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada orang-orang yang berada dalam pemerintahan desa.
- b. Trianggulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.
- c. Trianggulasi Waktu, untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud menggunakan bahan referensi disini adalah danya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Manggarai Barat

1. Sejarah Singkat Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat adalah suatu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 2003. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longos. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km².

Ide pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai Barat sudah ada sejak tahun 1950-an. Ide ini dimunculkan pertama kali oleh Bapak Lambertus Kape, tokoh Manggarai asal Kempo Kecamatan Sano Nggoang yang pernah duduk sebagai anggota Konstituante di Jakarta. Pada tahun 1963 aspirasi untuk memekarkan Kabupaten Manggarai dengan membentuk Kabupaten Manggarai Barat mulai diperjuangkan secara formal melalui lembaga politik partai Katolik Subkomisariat Manggarai. Pada tahun 1982 Manggarai Barat diberikan status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai Bagian Barat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-1355 tanggal 11 November 1982.

Melalui proses pengkajian yang matang dengan memperhatikan potensi dan luas wilayah serta kebutuhan untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat maka melalui Sidang Paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2003 aspirasi dan keinginan masyarakat Manggarai Barat mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat maka Kabupaten Manggarai Barat resmi terbentuk.

Pada tanggal 1 September 2003, Drs. Fidelis Pranda dilantik menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang bertugas menjalankan pemerintahan serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah definitif. Kemudian selanjutnya melalui proses demokrasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung Drs. Fidelis Pranda dan Drs. Agustinus Ch. Dula kemudian diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang pertama.

Pada tahun 2010, dilangsungkan proses pilkada yang kedua. Dari proses ini Drs. Agustinus Ch Dula dan Drs. Maximus Gasa menjadi Bupati dan wakil Bupati yang kedua. Pada awal berdirinya terbagi atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Boleng, Kecamatan Lembor, Kecamatan Welak, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Macang Pacar dan pada tahun 2011 dimekarkan menjadi 10 kecamatan dengan tambahan wilayah pemekaran yakni Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Mbeliling dan Kecamatan Ndosu.

Pada tahun 2015, dilangsungkan proses pilkada yang ketiga. Dari proses ini Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drh. Maria Geong, Ph.D menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang ketiga. Pada Tahun 2017 jumlah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat bertambah menjadi 12 Kecamatan. Kecamatan baru hasil pemerkeran yang ditetapkan melalui Perda No.14 dan No-15 Tahun 2017 adalah Kecamatan Pacar dan Kecamatan Kuwus Barat.



Gambar 1: Peta Lokasi Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Timur

2. Kondisi Geografis dan Iklim

Kabupaten Manggarai Barat memiliki batas-batas sebagai berikut: bagian utara berbatasan dengan laut Flores, bagian selatan dengan laut Sawu, bagian barat dengan selat Sape, dan bagian timur dengan Kabupaten Manggarai.

Kabupaten Manggarai Barat beriklim tropis. Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Manggarai Barat dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus

angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin berasal dari Asia dan Samudera Pasifik yang menyebabkan terjadinya musim hujan.

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Walaupun demikian, mengingat Manggarai Barat dan NTT umumnya dekat dengan Australia arus angin mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Manggarai Barat kandungan airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Manggarai Barat lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Manggarai Barat sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari sampai dengan Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering.

Besarnya curah hujan tahunan rata-rata sekitar 1500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terdapat di pegunungan yang mempunyai ketinggian 1000 m di atas permukaan laut, sedangkan curah hujan pada daerah-daerah lainnya relatif rendah. Secara umum iklimnya bertipe tropic kering atau semi arid dengan curah hujan yang tidak merata.

Suhu udara rata-rata di Manggarai Barat tahun 2011 berkisar antara 24,4°C sampai dengan 29,3°C. Kelembaban udara bervariasi antara 67% sampai dengan 86%.

3. Topografi, Geologi dan Hidrologi

Keadaan topografi Kabupaten Manggarai Barat bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan ketinggian yang bervariasi yakni kelas ketinggian kurang dari 100 m dpl sebanyak 23 %, 100–500 m dpl sebanyak 47 %, 500–1000 m dpl sebanyak 25 % dan lebih dari 100 m dpl sebanyak 3 %. Lebih dari 75 % ketinggian di atas 100 m dpl, kemiringan lerengnya bervariasi antara 0-2 %, 2-15 %, 15-40 % dan di atas 40 %. Namun secara umum wilayah Kabupaten Manggarai Barat memiliki topografi berbukit-bukit hingga pegunungan.

Ada tiga jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat yaitu Mediteran, Litasol dan Latosol. Tanah mediteran meliputi area seluas 1.334,21 km² atau 31,85%; tanah litasol seluas 1.504,25 km² atau 35,91% dan tanah latosol 109,00 km² atau 2,6% dari luas wilayah Manggarai Barat.

Kondisi sumber daya air daerah Manggarai Barat merupakan daerah dengan kondisi sumber daya air yang cukup memadai untuk sumber air minum, Masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut memiliki dua sumber mata air utama, yaitu mata air yang terdapat di pegunungan “*Poco Kuwus*” dan mata air yang terdapat di ujung timur daerah Runggu. Selain mata air utama terdapat juga mata air-mata air lain yang menunjang kebutuhan akan air minum masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan irigasi, terdapat dua sungai besar yang membatasi daerah geografis, yaitu sungai inpor dan sungai luas. Permasalahan terkait sumber daya air di daerah ini masih di kategorikan pada

permasalahan yang mikro. Secara umum, masyarakat tidak mengalami kesulitan berarti untuk mendapatkan air untuk kebutuhannya sehari-hari. Untuk sumber air minum, kendala utama yang dialami terletak pada kurangnya upaya pembersihan yang reguler terhadap sumber mata air. Hal ini berdampak pada menurunnya debit air yang mengalir karena material-material seperti bebatuan, dedaunan, dan sebagainya yang menyumbati aliran air. Untuk masalah air irigasi pertanian, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kesulitan masyarakat dalam mengaliri air sungai kepersawahan, karena masalah elevasi muka air sungai yang lebih rendah dari elevasi daerah persawahan.

4. Kondisi Demografi

Kondisi demografi atau kependudukan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan data agrerat kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2017 adalah sebanyak 256.491 jiwa, yang terdiri dari 128.932 laki-laki dan 127.559 perempuan. Rasio jenis kelamin 101 yang berarti dari 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan			Sex Rasio
			%		%		
1	Macang Pacar	15.987	12,4	15.390	12,5	31.917	100
2	Kuwus	12.663	9,8	12.712	10,0	25.375	100
3	Lembor	17104	13,3	17171	13,5	34.275	100
4	Sano Nggoang	7.425	5,8	7.358	5,8	14.783	101
5	Komodo	25.894	20,1	25.170	19,7	51.064	103
6	Boleng	9.758	7,6	9.571	7,5	19.275	103
7	Welak	10.885	8,4	10.589	8,3	21.474	103
8	Ndoso	10.252	8,0	10.231	8,0	20.483	100
9	Lembor Selatan	12.300	9,5	12.129	9,5	24.429	101

10	Mbeliling	6.664	5,2	6.752	5,3	13.416	99
TOTAL		128.932	100	127.559	100	256.491	101

Tabel 4: Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur

Umur	Laki-Laki		Perempuan		Sex Rasio
		%		%	
00-04	8.672	6,7	8.161	6,4	106
05-09	14.051	10,9	13.694	10,7	103
10-14	17.363	13,5	16.893	13,2	103
15-19	15.832	12,3	15.093	11,8	105
20-24	12.489	9,7	12.841	10,1	97
25-29	10.074	7,8	10.592	8,3	95
30-34	9.747	7,6	10.309	8,1	95
35-39	8.514	6,6	8.735	6,8	97
40-44	7.328	5,7	7.746	6,1	95
45-49	6896	5,3	7.107	5,6	97
50-54	5.760	4,5	5.493	4,3	105
55-59	4.259	3,3	4.113	3,2	104
60-64	2.935	2,3	2.507	2,0	117
65-69	2.084	1,6	1.955	1,5	107
70-74	1.458	1,1	1.248	1,0	117
75	1.470	1,1	1.072	0,8	137
Total	128.932	100	127.559	100	101

Tabel 5: Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin

Agama	Laki-Laki		Perempuan		L+P	
		%		%		%
Islam	25.834	20,0	25348	19,9	51.191	20,0
Kristen	792	0,6	721	0,6	1.513	0,6
Katolik	102.171	79,5	101362	79,5	203.533	79,4
Hindu	114	0,1	114	0,1	228	0,1
Budha	9	0,0	11	0,0	20	0,0
Khonghucu	2	0,0	1	0,0	3	0,0
Lainnya	1	0,0	2	0,0	3	0,0
Total	128.932	100	127.559	100	254.491	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017

Mobilitas Penduduk Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan Rekapitulasi Jumlah Migrasi masuk dan Migrasi Keluar Penduduk selama 6

bulan pertama (semester 1) antara Januari-Juni tahun 2017, sebagai berikut: Pada Kecamatan Macang Pacar migrasi masuk tengah tahun sebanyak 25 orang, pada Kecamatan Kuwus sebanyak 42 orang, pada Kecamatan Lembor sebanyak 62 orang, pada Kecamatan Sano Nggoang sebanyak 19 orang, pada Kecamatan Komodo sebanyak 290 orang, pada Kecamatan Boleng sebanyak 19 orang, pada Kecamatan Welak sebanyak 21 orang, pada Kecamatan Ndosos sebanyak 35 orang, pada Kecamatan Lembor Selatan sebanyak 28 orang, pada Kecamatan Mbeliling sebanyak 21 orang.

Sedangkan migrasi keluar penduduk semester 1 (Januari-Juni) 2017 menunjukkan bahwa pada kecamatan Macang Pacar migrasi keluar tengah tahun sebanyak 51 orang, pada Kecamatan Kuwus sebanyak 74 orang, pada Kecamatan Lembor sebanyak 85 orang, pada Kecamatan Sano Nggoang sebanyak 17 orang, pada Kecamatan Komodo sebanyak 194 orang, pada Kecamatan Boleng sebanyak 23 orang, pada Kecamatan Welak sebanyak 38 orang, pada Kecamatan Ndosos sebanyak 54 orang, pada Kecamatan Lembor Selatan sebanyak 31 orang, pada Kecamatan Mbeliling sebanyak 17 orang.

B. Deskripsi Khusus Pasir Panjang sebagai Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Pasir Panjang

Pulau Rinca sebagai salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur, yang dihuni oleh masyarakat asli pulau Rinca maupun masyarakat pendatang sejak tahun 1907 yang berawal dari Desa adat yang diperintah secara turun temurun oleh rumpun bangsawan setempat. Pulau Rinca merupakan salah satu pulau

yang berada di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dilihat dari lokasinya terletak pada ketinggian 50,50 M, di atas permukaan laut.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pasir Panjang, dalam catatan administrasi desa yang diterangkan oleh sekretaris desa, bapak Ibrahim Hamsa, dicatat bahwa luas wilayah pulau Rinca adalah 19,62 Ha. Dengan luas tanah pertanian seluas 88,124 Ha. Lingkungan alam terdiri atas lahan garap persawahan (jagung, jambu mangga, dan lain-lain), perkebunan (pisang, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan lain-lain), dan perhutanan (kayu jati, buah kelapa, dan sebagainya). Kebanyakan tanah dataran tinggi yang sangat subur untuk segala jenis tanaman di setiap musimnya. Batas Administratif Desa Pasir Panjang di Pulau Rinca meliputi:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Warlok.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Padar.
- c. Sebelah Utara berbatasan Desa Papagarang.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gili Motang.

Berdasarkan jenis kelamin, populasi penduduk Desa Pasir Panjang di Pulau Rinca sampai dengan Juni Tahun 2017 adalah sebagai berikut: jumlah Laki-laki sebanyak 780 orang dan Perempuan sebanyak 770 orang. Jumlah kepala keluarga sebanyak 423 KK, sedangkan jumlah keluarga miskin 105 KK dengan persentase 33,39% dari jumlah keluarga.

Penduduk yang mendiami Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat khususnya di Pulau Rinca, yang berasal dari beberapa etnis yaitu etnis Suku Bajo (Seme), Bima (Mbojo), Bugis, dan Manggarai. Masyarakat Pulau

Rinca yang berasal dari daerah setempat dengan jumlah dusun yang tersebar di wilayah Desa Pasir Panjang sebanyak 6 dusun. Jumlah penduduk pada tahun 2017 yang tersebar di tiap dusun adalah sebagai berikut: dusun Komodo sebanyak 318 orang, dusun Bajo sebanyak 310 orang, dusun Beringin Jaya sebanyak 291 orang, dusun Kerora sebanyak 234 orang, dusun Kukusan sebanyak 203 orang, dusun Beringin Baru sebanyak 204 orang.



Gambar 2: Peta lokasi Pulau Rinca sebagai Lokasi Penelitian

2. Pendidikan dan Keterampilan

Pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, serta kualitas intelektual masyarakatnya. Salah satu bentuk usaha dalam pengembangan sumberdaya manusia ini adalah meningkatkan mutu pendidikan. Akses penduduk yang lebih terbuka ke berbagai fasilitas pendidikan, tingkat kesejahteraan yang cukup memadai dan ditunjang dengan orientasi hidup yang sangat dipengaruhi kebudayaan urban, telah menjadikan penduduk desa Pasir Panjang mempunyai pula aspirasi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sekalipun demikian tingkat pendidikan penduduk di desa

Pasir Panjang masih rata-rata sekolah wajib 12 tahun. Tercatat ada 280 orang penduduk desa Pasir Panjang yang berpendidikan sekolah dasar, orang tamat SMP 27 orang dan yang tamat SMA terdapat 38 orang dan yang berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 13 orang.

Tabel 6: Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sekolah Dasar	280
SMP/SLTP	27
SMA/SLTA	38
Akademi D1-D3	3
Sarjana	10
Total	358

Sumber Data Kantor Lurah, 2018

Jumlah ini belum termasuk yang belum sekolah. Ada kecenderungan, bagi masyarakat Pasir Panjang yang telah menamatkan pendidikan yang cukup tinggi untuk bekerja sebagai pemandu wisata. Karena desa Pasir Panjang memang termasuk kedalam wilayah Tamana Nasional Komodo.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu bentuk yang dinyatakan sebagai pekerjaan sehari-hari. Sebagaimana sebagian besar pulau-pulau lainnya di wilayah Kecamatan Komodo, mayoritas masyarakat Pulau Rinca memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan. Hal ini tidak lepas dari luas perairan laut

yang cukup besar di Pulau Rinca, hampir semua masyarakat Pulau Rinca mempunyai motor laut (sampan atau perahu).

Masyarakat Pulau Rinca terdiri atas penduduk asli dan pendatang, mereka memiliki mata pencaharian yang cukup beragam, tetapi sebagian besar bekerja di laut yaitu nelayan atau sebagian orang bekerja di perkebunan, sebagian diantaranya ada yang pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Polisi Hutan, Petani, Peternak, Bidan Swasta, dan sebagainya.

4. Kondisi Sosial Budaya

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan mencapai berbagai aspek yakni pembangunan ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya. Permasalahan yang dialami dan bahkan dihadapi kedepan Desa Pasir Panjang adalah masih rendahnya SDM yang dimiliki masyarakat karena masih banyak generasi muda yang tidak sekolah, sulitnya akses transportasi yang menyebabkan terhambatnya proses pengangkutan hasil laut masyarakat, sistem pengolahan hasil laut yang masih bersifat tradisional.

Sarana dan prasarana yang ada di desa Pasir Panjang adalah jalan setapak dari Dusun Komodo sampai Dusun Bajo sepanjang 200 meter, jalan setapak di Dusun Kukusan sepanjang 100 meter, dermaga di Dusun Komodo sepanjang 132 meter, dermaga di Dusun Kukusan sepanjang 65 meter, motor tangki air dua unit. Untuk memenuhi pelayanan kesehatan di desa Pasir Panjang telah di

bangun Polindes satu unit di Dusun Komodo, dan tiga Posyandu yang tersebar di tiga dusun.

Masyarakat Pulau Rinca sangat erat dengan sistem gotong royong. Ada 3 sistem gotong royong, yaitu; *Malaku Tuloh* (minta tolong), *Mase Te Kaan* (kasihani saya), *Daha Dipalaku* (jangan diminta). Dari ketiga ungkapan tersebut ungkapan berbeda tapi artinya sama, kegiatan ini tidak hanya dalam bentuk material tetapi juga tenaga. *Malaku Tuloh* dapat di artikan sebagai pemberian pertolongan yang akan dibalas pada kesempatan lain. *Masete Kaang* lebih pada memberikan pertolongan yang harus dibalas pada kesempatan lainnya. Sedangkan *Daha Dipalaku* lebih dikhususkan tanpa mengharapkan imbalan berupa jasa atau materi.

Masyarakat Pulau Rinca memiliki beberapa jenis upacara adat, nilai dari upacara adat daur hidup (*life cycle*) seperti proses kelahiran, perkawinan, bahkan dengan upacara kematian. Di samping itu juga, upacara yang berkaitan dengan suatu pekerjaan seperti membangun rumah, mendorong motor laut, melakukan sedekah (bersedekah) merupakan bagian penting dari adat masyarakat Bajo di pulau Rinca. Hal ini seperti sedekah orang, sedekah tolak bala, sedekah *loho pote* (sedekah bubur putih), *parapu* (sesajian), sedangkan upacara adat yang berhubungan dengan perkawinan seperti, *pupo danakang* (kumpul keluarga), *pagiri diri* (sasame keluarga), *pupo keluarge* (kumpul keluarga). Dalam upacara-upacara tersebut biasanya digelar kesenian seperti, pencat silat dan gong genong.

Kehidupan masyarakat dalam berhubungan sosial masih memegang teguh yang namanya penggolongan atau pembagian strata yang mempengaruhi bagaimana pola kepemimpinan yang ada, secara umum terbagi menjadi dua strata sosial yaitu *Aha Madia dan Aha Madiata* (golongan bawah dan golongan atas).

5. Kehidupan Keberagamaan

Dari sejumlah masyarakat Pulau Rinca di desa Pasir Panjang yang ada, hampir seluruhnya memeluk agama Islam, dan sebagian kecil beragama Kristen dan Katolik dikarenakan agama yang dianut oleh warga pendatang. Agama pertama yang dikenal oleh masyarakat Bajo di Pulau Rinca selama berabad-abad adalah agama Islam, masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke-15 dan abad ke-16. Dengan demikian agama penduduk asli Bajo di pulau Rinca berupa agama Islam. Masyarakat Pulau Rinca sekitar 99% beragama Islam, dan sisanya itu beragama Kristen dan agama Katolik. Walaupun terdapat berbagai macam agama pada masyarakat pulau Rinca, tetapi masyarakatnya sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Hal ini ditunjukkan adanya bangunan tempat beribadah masing-masing agama.

Masyarakat Bajo mayoritasnya Islam tetapi masih banyak yang percaya akan kepercayaan dinamisme atau percaya pada pohon-pohon yang besar, batu-batu yang besar, dan tempat-tempat angker di huni oleh roh-roh, jin, dan setan, atau sering disebut oleh masyarakat Bajo "*nia dapu ne*" (tempat yang berpenghuni). Warga tersebut percaya kalau melewati tempat itu tidak boleh ribut, dan harus sopan, tidak boleh berkata sembarangan, jika itu dilanggar

maka orang-orang yang melanggar akan mendapat musibah, gila, dan lain-lain. Masyarakat Bajo memiliki nama-nama terhadap makhluk-makhluk halus tersebut, ada yang diberi nama *dapu dia*, *rombeh susu* (makhluk halus yang terdapat di hutan), *papokah* (manusia jadi-jadian), dan jin.

Sistem kepercayaan masyarakat Bajo percaya adanya guna-guna untuk menjatuhkan lawan, ada juga yang disebut *bura* yang disimpan ditempat yang akan dilalui oleh orang yang tidak diinginkan atau lawan, seperti dalam pertandingan bola, acara perkawinan, di kebun, di bawah pohon dan di bawah tangga rumah. Masyarakat Bajo juga percaya akan benda-benda pusaka yang bertuah seperti keris, golok yang mempunyai kekuatan gaib. Sama halnya dengan masyarakat Bajo pada umumnya, masyarakat pulau Rinca juga percaya dengan adanya makhluk lain (makhluk halus) akan tetapi bukan dijadikan sebagai sebuah kepercayaan atau keyakinan untuk dianut oleh umat manusia, karena bertentangan dengan ajaran Islam bagi yang menganutnya.

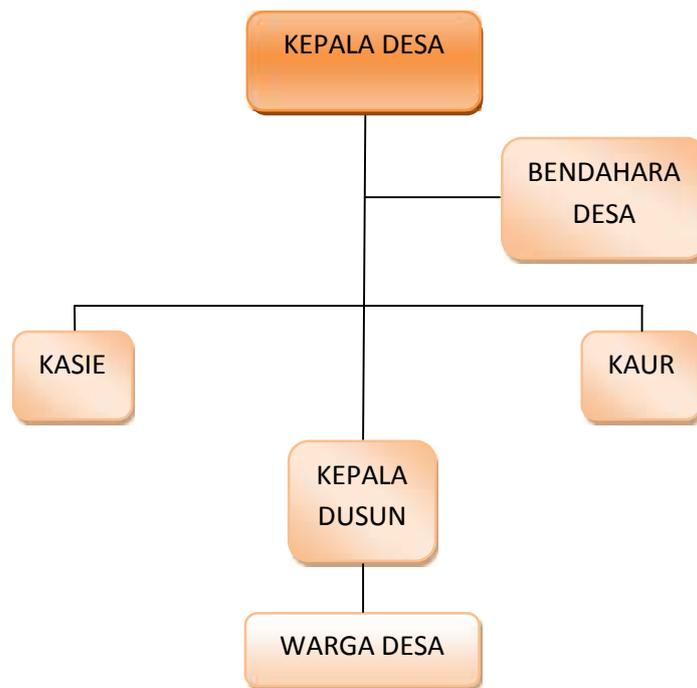
Ilmu pengetahuan yang dikuasai masyarakat dari sisi kehidupan mereka lebih banyak mengacu keyakinan beragama, paling tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan seperti ritual-ritual kitab suci dan tradisisi-tradisi. Aspek pengetahuan dan keyakinan telah memiliki hubungan erat, karena pengetahuan tentang keyakinan adalah syarat bagi penerimanya. Walaupun demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak perlu bersandar pada keyakinan. Lebih jauh seseorang dapat berkeyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya, atau bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit.

BAB V
BENTUK FEODALISME KEPEMIMPINAN
PADA MASYARAKAT KOMODO

Kepemimpinan yang ada pada masyarakat desa Pasir Panjang dimana paradigma kepemimpinan yang masih menganggap bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki otoritas kekuasaan penuh dalam memimpin, sehingga kepemimpinan feodal tetap bertahan pada masyarakat setempat. Sebagaimana dalam masyarakat desa Pasir Panjang secara khususnya dikenal dengan tiga istilah, yaitu "*Aha Sugih*", "*Aha Etete*", "*Aha Madiata*". *Ah Sugih* (Orang Kaya), pemimpin di desa Pasir Panjang dari kalangan yang kaya karena memiliki kekuasaan dan sangat dihargai oleh masyarakat setempat; *Aha Etete* (Buruh Nelayan), orang yang bekerja untuk mendapatkan upah dari *aha sugih* (orang kaya), yang hidup dan matinya mengabdikan untuk orang kaya; *Aha Madiata* (Orang Besar atau Tinggi), orang yang sangat disegani dikalangan masyarakat setempat. Walaupun seorang buruh nelayan berpenghasilan tinggi namun mereka tidak akan menjadi seorang *Aha Madiata* dan begitu pula sebaliknya apabila seorang dari keturunan bangsawan itu miskin, maka ia tidak akan sereta merta merubah status sosialnya.. Namun secara umumnya pembagian masyarakat hanya dibagi berdasarkan dua pembagian, yaitu *Aha Madia* dan *Aha Madiata*.

Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Sejak terbentuknya suatu kelompok sosial, seseorang atau beberapa orang diantara warga melakukan peranan yang lebih aktif

daripada warga yang lain sehingga orang tadi atau beberapa orang terlihat lebih menonjol dari yang lain. Itulah asal mula munculnya kepemimpinan, yang kebanyakan muncul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil.



Bagan 2: Kepemimpinan Desa

Pemimpin bergaya feodal ini cenderung menjadi otoriter. Mereka mendefinisikan pemimpin sebagai pribadi yang memiliki kekuasaan. Pola kepemimpinan seperti ini sangat membudaya di Indonesia. Pengabdian pemimpin ini bukanlah kepada masyarakat atau bawahan yang dipimpinnya, tetapi kepada struktur atau orang-orang yang dia anggap memiliki kekuasaan yang lebih besar. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin tinggi pula kedudukannya dalam suatu strata atau struktur. Disini jelas, bahwa pemimpin jenis ini memandang orang atas dasar besarnya kekuasaan yang dimiliki. Orang dikelompokkan ke dalam strata-strata, sebuah pandangan khas dari paham feodalisme.

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Tayeb bahwa:

“masyarakat pulau rinca adalah masyarakat yang homogen. Namun yang dominan adalah suku Bajo. Maka terjadi penggalan atau pengkotak-kotakan atau pengelompokan dimana terdapat *aha madia* dan *aha madiata*. Sampai kapanpun dua strata sosial yang ada pada masyarakat bajo khususnya desa Pasir Panjang tidak akan pernah menyatu karena akan tetap bertolak dari strata manakah seseorang itu mulai”. (Wawancara: 30 Juli 2018)

Selain itu Ibu Mariyani saat diwawancarai mengungkapkan bahwa:

“sistem yang ada di desa Pasir Panjang ini masih dipengaruhi oleh *aha madia* dan *aha madiata*. Apabila sistem seperti ini selalu dipertahankan atau tidak dirubah maka tidak akan ada perubahan yang bagus kedepannya terhadap kampung ini”. (Wawancara: 03 Agustus 2018)

Bapak Mustakim juga mengungkapkan bahwa:

“sistem yang ada di desa Pasir Panjang masih mempertahankan sistem pagiri kite (sesama kita) sehingga tidak ada perubahan yang terjadi”. (Wawancara: 05 Agustus 2018)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ketiga narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Bajo khususnya desa Pasir Panjang masih mempertahankan sistem pembagian strata sosial menjadi dua golongan yaitu *Aha Madia dan Aha Madiata* sehingga dalam pemerintahan di desa Pasir Panjang masih digolongkan dalam pemerintahan feodal atau kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki keturunan bangsawan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di desa Pasir Panjang berkaitan dengan sistem kepemimpinan menunjukkan bahwa:

“Strata sosial yang ada pada masyarakat desa Pasir Panjang selalu dipertahankan sehingga sangat berpengaruh bahkan dalam pola kepemimpinan desa sekalipun, orang-orang yang diangkat menjadi Kepala Desa ditentukan karena berada atau dari strata mana ia berasal. Kepemimpinan seperti ini menyebabkan feodalisme dalam kepemimpinanpun tidak akan pernah hilang, karena dalam masyarakat, orang-orang dari golongan *aha madiata* lebih diutamakan untuk menjadi seorang pemimpin”.

Sistem kepemimpinan seperti ini memang dipertahankan sejak dahulu dimana dipengaruhi oleh sistem kerajaan pada Kabupaten Manggarai. Setelah Indonesia merdeka dan menganut demokrasi yang kemudian mempengaruhi kerajaan-kerajaan sehingga untuk memimpin suatu daerah tidak lagi berdasarkan keturunan raja. Ini berdampak hingga pada elemen pemerintahan terendah yaitu pada tingkat desa seperti yang terjadi pada masyarakat desa Pasir Panjang yang mana dalam menentukan kepala desa, dilakukan pemilihan umum. Pada masa-masa sebelumnya, dalam menentukan pemimpin desa maka akan ditunjuk dari kalangan orang kaya, berpengaruh, atau setidaknya ia berasal dari golongan bangsawan (*aha madiata*).

Seperti yang tampak dalam gambar bahwa sistem *pagiri kite* (sesama kita) terjadi dalam mekanisme rapat desa, dimana orang yang hadir dalam forum hanyalah orang yang dari golongan *aha madiata* atau hanya sesama *aha madiata* saja.



Gambar 1.1: Keadaan Rapat Desa

Pada dasarnya siapa saja bisa menjadi seorang kepala desa. Namun tetap harus memiliki dasar pendidikan yang memadai dan mampu menjadi seorang pemimpin. Ia haruslah berasal dari setidaknya keturunan bangsawan atau termasuk dalam golongan atas. Kalaupun ia bukan keturunan bangsawan, setidaknya ia memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Ketika diantara kaum bangsawan tidak memiliki pendidikan yang cukup, maka akan diambil dari orang bawah atau strata bawah untuk menjadi pemimpin. Namun, secara tidak langsung orang-orang yang berada pada strata sosial atas (*aha madiata*) memiliki pendidikan yang cukup bagus bahkan rata-rata berpendidikan tinggi.

Walaupun dalam proses pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara pemilihan umum, tetapi masyarakat desa Pasir Panjang tetap mempertahankan penggolongan strata sosial yang mana ada golongan atas dan ada golongan bawah. Sehingga lebih mengacu kepada dari golongan mana seseorang itu berasal. Sistem feodal ini tidak tampak secara mencolok, tetapi apabila dilihat lebih mendalam feodalismenya akan tampak.

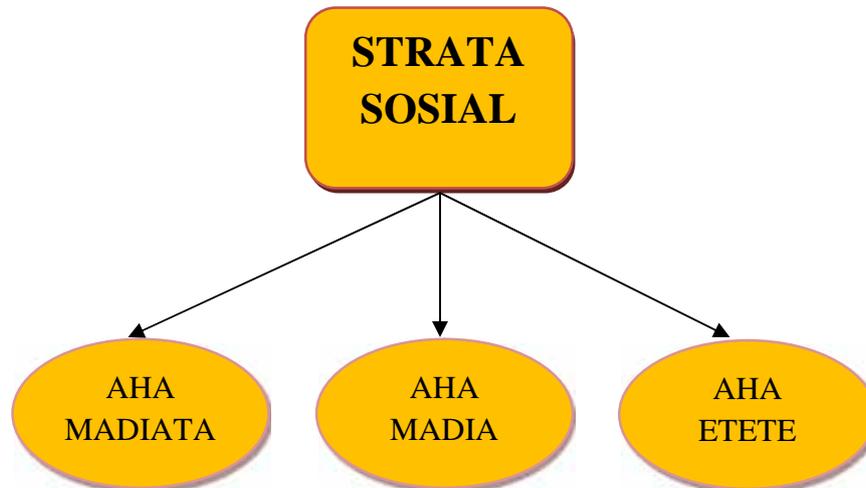
Dapat kita lihat dari perspektif teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawls bahwa keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi.

Perbedaan capaian seorang individu dalam masyarakat maupun dalam hidupnya sendiri, sangat ditentukan oleh tatanan alamiah yang hadir tanpa pernah

sekalipun individu memilihnya. Terlahir dari golongan masyarakat kaya atau miskin, secara genetis tampan atau cantik atau tidak, terlahir dengan kulit berwarna gelap atau tidak merupakan tata alamiah yang tidak dapat dipungkiri kehadirannya. Kehadiran tata alamiah ini menyebabkan ada ketimpangan dalam kompetisi sosial, ekonomi, dan politik yang didapatkan oleh individu yang disebabkan oleh kondisi tersebut.

Sehingga keadaan yang terjadi pada masyarakat desa Pasir Panjang ini dimana dalam masyarakat terdapat dua strata sosial yaitu ada strata atas, bangsawan atau *Aha Madiata* dan strata sosial bawah, rakyat biasa atau *Aha Madia* yang tidak bisa begitu saja dihapuskan dalam kehidupan sosial mereka. Keadaan ini dapat dikatakan tidak adil jika kita melihat dari perspektif John Rawls bahwa dalam masyarakat hendaknya diberikan peluang atau kesempatan untuk mengaktualisasikan diri sebaik-baiknya, walaupun dalam proses untuk mengaktualisasikan dirinya ini sangat dipengaruhi apakah ia kaya atau miskin, ganteng atau cantik dan sebagainya. Pembagian strata sosial ini sangat berdampak dalam proses kepemimpinan yang ada di desa Pasir Panjang.

Seperti yang terlihat dalam bagan stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat desa Pasir Panjang dibawah ini, bahwa secara umum terdapat tiga pembagian strata sosial pada masyarakat dimana ada kaum bangsawan, kaum dibawah, dan buruh nelayan.



Bagan 3: Bentuk Strata Sosial Masyarakat Rinca

Adanya kepemimpinan feodal ini atau kepemimpinan yang melahirkan dinasti kepemimpinan misalnya setelah ia menjadi seorang kepala desa, maka ia akan memilih kaur-kaur atau staf-staf kepengurusan desa hanya dari anggota keluarganya saja walaupun orang-orang yang mampu mengemban tugas menjadi kaur tersebut ada orang lain yang memang dirasa lebih mampu.

BAB VI
IMPLIKASI FEODALISME KEPEMIMPINAN PADA
MASYAKARAT KOMODO

Impikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari sesuatu. Seperti yang akan dijelaskan dalam bab ini bagaimana dampak dari kepemimpinan bergaya feodal ini terhadap masyarakat desa Pasir Panjang. Bagaimanakah sebenarnya kepemimpinan bergaya feodal ini bagi masyarakat desa Pasir Panjang.

Pada masyarakat suku Bajo desa Pasir Panjang pengaruh didapatkan karena status sosial dari seseorang. Status sosial tersebut diperoleh seseorang sejak lahir, dimana lahir dari kalangan bangsawaan disebut dengan golongan "*Aha Madiata*" dan lahir dari kalangan rendah disebut dengan "*Aha Madia*". Penggolongan masyarakat tersebut menyebabkan munculnya strata sosial di desa Pasir Panjang, dimana kaum bangsawanlah yang lebih berhak dan memiliki kekuasaan atau wewenang lebih untuk mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Kuatnya tradisi masyarakat terhadap strata sosial yang ada di suku Bajo khususnya masyarakat desa Pasir Panjang memberikan peluang besar kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang terdiri dari kalangan atas. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa bagaimanapun dalam pelaksanaan pemilihan dilakukan secara demokratis, namun setelah menjadi kepala desa praktek-praktek feodalisme dan nepotisme tetap ada.

Seperti yang dikatakan Ibu Mariyani selaku warga desa bahwa:

“kalau menurut saya pribadi kepemimpinan feodalisme ini tidak bagus karena alasannya kepemimpinan seperti ini sepertinya dalam forum kekeluargaan, memilih keluarga ataupun golongan yang mereka sukai”. (Wawancara: 03 Agustus 2018)

Selain itu Bapak Mardin juga saat diwawancarai mengungkapkan bahwa:

“saya sebagai masyarakat biasa merasa sangat dirugikan ketika saya memiliki kemampuan untuk berpendapat tapi tidak pernah diundang hadir dalam pertemuan atau forum-forum. Saya juga sebagai masyarakat merasa dirugikan apabila ada bantuan tapi selalu diabaikan dan hanya dari mereka saja yang menerima”. (wawancara: 05 Agustus 2018)

Dari pernyataan yang disampaikan kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ia tidak setuju dengan adanya kepemimpinan bergaya feodal yang ada di desa Pasir Panjang yang masih kental dengan nuansa kekeluargaan dan golongan-golongan tertentu. Sehingga ketika ada orang yang dirasa mampu untuk berada dalam pemerintahan desa atau mampu menjadi anggota pengurus desa, maka ia tidak dapat menjadi pengurus desa. Dengan adanya kepemimpinan feodal ini yang lebih mementingkan atau mendahulukan keluarganya atau orang-orang dekatnya dibandingkan orang lain.

Dari hasil observasi di lapangan terlihat bahwa:

“yang berhak atas kepemimpinan desa Pasir Panjang adalah individu atau masyarakat yang terlahir atas kekayaan dan juga status sosialnya. Walaupun dilakukan secara demokrasi namun tetap saja yang berhak menjadi pemimpin di desa Pasir Panjang adalah orang yang memiliki harta kekayaan dan memiliki strata yang lebih tinggi, dan tidak ada kesempatan kepada orang-orang yang bukan dari kalangan bangsawan atau golongan Aha Madiata”.

Dampak yang lain dari adanya sistem kepemimpinan seperti ini adalah ketika ada kegiatan-kegiatan desa yang dilaksanakan, maka orang-orang yang berpartisipasi sebagai pelaksana kegiatan ini dipilih berdasarkan faktor kekeluargaan atau dikarenakan ia dekat dengan pengurus-pengurus desa walaupun

orang ini tidak mampu dalam melaksanakan tugas atau memang bukan bidangnya tetap dipilih. Selain itu juga, dalam pengambilan-pengambilan keputusan biasanya diadakan rapat namun orang-orang dari masyarakat biasa atau golongan bawah tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat bahkan ikut dalam forum tersebut.

Pada masyarakat desa Pasir Panjang memang sangat kuat dalam mempertahankan tradisi pembagian status sosial masyarakat kedalam dua bagian yaitu kaum atau golongan atas dan golongan bawah yang sangat mempengaruhi proses kepemimpinan desa yang ada di sana. Sehingga berdampak pada pembangunan desa atau proses memajukan desa. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ketika ada rapat atau musyawarah untuk memajukan desa, hanya orang-orang dekat atau keluarga sajalah yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sedangkan orang biasa atau rakyat biasa tidak bisa menyampaikan usulan atau pendapatnya dalam forum.

Seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini bahwa dalam pembagian bantuan desa, tidak semua warga desa mendapatkan bantuan. Hanya orang-orang yang dekat atau keluarga dari kepala desa sajalah yang di dahulukan dalam pebagian bantuan tersebut. Dalam hal ini adalah pembagian bantuan renofasi rumah di desa Pasir Panjang.



Gambar 1.2: Pembagian Bantuan Desa

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di atas, maka dapat diketahui dampak yang muncul akibat kepemimpinan feodal ini dimana ada masyarakat yang setuju dan ada juga yang tidak setuju.

Tabel 7: Implikasi Kepemimpinan Feodal

DAMPAK NEGATIF	DAMPAK POSITIF
Tidak menerima bantuan	Mudah meminta bantuan
Tidak bisa melakukan protes	Selalu ada kebijakan untuk masyarakat biasa
Selalu dipandang rendah	

Apabila kita kaitkan dengan definisi keadilan bahwa keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah

tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Sebagaimana prinsip keadilan menurut John Rawls dalam Stephen P. Robbins (2009), bahwa terdapat dua prinsip-prinsip keadilan yaitu:

1. *each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.*
2. *a) social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantaged and b) are attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.*

Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu.

Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik,

ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.

Dari prinsip pertama dapat kita lihat bahwa pada masyarakat desa Pasir Panjang dalam penerapannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang dijelaskan oleh John Rawls di atas dimana dalam menyampaikan hak suara atau menyampaikan pendapat dibatasi bahkan tidak diberikan kesempatan untuk ikut dalam forum.

Pada prinsip kedua dapat kita lihat dalam masyarakat Bajo terutama masyarakat desa Pasir Panjang bahwasannya masyarakat desa dari golongan bawah tidak bisa berpartisipasi dalam kehidupan sistem sosial, politik, ekonomi di desa. Sehingga dalam prinsip kedua yang dijelaskan Rawls ini tidak sesuai dengan keadaan yang ada pada masyarakat desa Pasir Panjang. Ketidak sesuaian ini juga disebabkan karena pada masyarakat Pasir Panjang ini masih memegang pembagian status sosial kedalam dua golongan yaitu golongan atas atau *Aha Madiata* dan golongan bawah atau *Aha Madia*.

BAB VII

RESPON MASYARAKAT TERHADAP SISTEM KEPEMIMPINAN

FEODAL PADA MASYARAKAT KOMODO

Feodalisme sendiri pada dasarnya ialah struktur pendelegasian kekuasaan sosial dan politik yang dijalankan oleh kalangan bangsawan untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pimpinan-pimpinan lokal sebagai mitra, namun sekarang lebih mengarah kepada golongan atau kasta dalam suatu posisi kalangan masyarakat. Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai.

Sejak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah “masyarakat feodal”. Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah ini dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas.

Kondisi jiwa feodal di Indonesia bisa diambil contoh dari zaman demokrasi saat ini, dimana orang-orang di Indonesia saling bersaing untuk mendapatkan satu kursi untuk menduduki jabatan yang hanya sebagai untuk mendapatkan barisan kasta golongan atas di masyarakat sebagai penguasa, dan tentu bukan untuk kepentingan utamanya untuk masyarakat sendiri.

Seperti yang kita dapat lihat pada sistem masyarakat desa Pasir Panjang yang berada di Kabupaten Manggarai Barat ini bahwa dalam masyarakatnya

terdapat pembagian masyarakat berdasarkan pada golongan kaya, bangsawan atau dalam bahasa setempat disebut *Aha Madiata* dan golongan bawah, rakyat biasa, buruh nelayan atau *Aha Madia*. Sistem kepemimpinan masyarakat ini pada awalnya hadir karena mengikuti sistem kerajaan pada wilayah Manggarai.

Sistem yang bertahan cukup lama ini kini mulai dipertanyakan dan menuai protes. Walaupun penunjukan langsung dilakukan awalnya dalam memilih seorang pemimpin, kini sistem penunjukan langsung itu telah dihapuskan dan berganti dengan pemilihan umum. Namun secara langsung maupun tidak langsung faktor kebangsawanan seseorang tadi tetap berpengaruh dan mempengaruhi masyarakat sehingga tetap memilih pemimpin yang berlatar belakang seorang keturunan bangsawan atau *Aha Madiata*.

Dari sinilah maka dapat kita lihat bagaimana respon dan tanggapan masyarakat setelah terpilihnya seorang pemimpin yang kemudian dalam pemilihan aparat-aparat desa dipilih berdasarkan faktor kekeluargaan bahkan sampai-sampai dalam perjalanan kepemimpinannya pun lebih mengutamakan kedekatan keluarga dalam pendistribusian bantuan. Sebagaimana tanggapan dari Bapak Herdi tentang proses pengambilan keputusan oleh kepala desa bahwa:

“karena saya sebagai masyarakat tidak bisa berkomentar tentang keputusan yang dibuat pemimpin karena jumlah kami aha madia sangatlah kecil dan keputusan itu selalu di dukung kuat oleh golongan aha madiata yang jumlahnya jauh lebih banyak. Setiap keputusan yang dibuat pemimpin selalu masyarakat setuju karena walaupun ada masyarakat tidak setuju tidak bisa membatalkan keputusan karena jumlah masyarakat yang tidak setuju kebanyakan dari keluarga aha madiata”. (Wawancara: 05 Agustus 2018)

Dari tanggapan Bapak Herdi ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan pun selalu diambil secara sepihak dan tidak

mempertimbangkan pendapat dari masyarakat sehingga mau atau tidak maunya masyarakat harus menerima keputusan tersebut. Sebagaimana tanggapan dari seorang responden Bapak Mansur yang berpendapat tentang adanya sistem feodal ini dan mengatakan bahwa:

“saya pribadi tidak setuju dengan sistem seperti ini alasannya karena menurut saya apabila sistem seperti ini selalu dipertahankan maka tidak akan ada kemajuan atau perkembangan yang terjadi di desa Pasir Panjang ini, karena mereka masih memilih orang-orang hanya dalam kalangan atau golongan tertentu saja. Saya sebagai masyarakat sangat tidak setuju tetapi bagaimana lagi, kami sebagai masyarakat tidak punya kemampuan untuk protes”. (Wawancara: 31 Juli 2018)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada masyarakat-masyarakat yang tidak setuju dengan kepemimpinan ini dan menganggap bahwa tidak akan ada kemajuan atau perkembangan di desa apabila sistem ini tetap dipertahankan. Dari pernyataan ini juga memunculkan pertanyaan baru mengapa atau apa alasan masyarakat untuk tetap memilih orang-orang dari golongan *Aha Madiata* untuk menjadi pemimpin. Pada saat yang sama juga ada sebagian masyarakat menolak dengan adanya kepemimpinan seperti ini. Seperti pernyataan dari Mustakim bahwa:

“kami sebagai masyarakat bukannya tidak mempercayai orang lain untuk menjadi pemimpin tetapi kami sebagai masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan dari orang-orang aha madiata karena orang-orang madiata jumlahnya banyak dibandingkan kami yang jumlahnya sedikit apa lagi golongan dari orang di bawah atau aha madia”. (Wawancara: 31 Juli 2018)

Pernyataan ini diperjelas lagi oleh seorang Guru Bapak Herdi dan Pak Abas yang mengatakan bahwa:

“saya memilih orang kaya karena ketika ada masyarakat biasa atau orang-orang madia membutuhkan bantuan atau sakit, orang pertama yang akan kami datangi tadi adalah aha madiata. Sehingga orang yang kami pilih

menjadi pemimpin itulah mengapa kami selalu memilih aha madiata menjadi pemimpin”. (Wawancara: 01 Agustus 2018)

“...bisa saja yang orang miskin menjadi pemimpin tetapi kebanyakan masyarakat yang ada di desa Pasir Panjang ini memilih orang kaya karena menurut mereka bahwa pemimpin dari keluarga aha madiata akan membantu mereka saat kesusahan atau sakit”. (Wawancara: 05 Agustus 2018)

Dari pernyataan Bapak Mustakin, Pak Herdi dan Pak Abas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun mereka menolak dengan kepemimpinan feodal ini, tapi mereka juga merasa terbantu ketika ada keluarganya atau masyarakat sakit, maka mereka dapat meminta bantuan kepada orang kaya dalam hal biaya pengobatan sehingga sampai sekarang mereka tetap memilih pemimpin dari kalangan *Aha Madiata*.

Dapat kita lihat bahwasannya terdapat beberapa tipe kepemimpinan diantaranya adalah tipe tradisional yang mana pemimpin semacam ini adalah pemimpin yang dipilih atas dasar kebiasaan turuntemurun atau tradisi. Misalnya pada jaman feodal kedudukan: raja, bupati bahkan lurah di desapun orang cenderung memilih turunan atau sanak famili dari pejabat lama.

Sistem ini tidak diperhitungkan kecakapan calon pemimpin, yang terpenting adalah melestarikan tradisi, dan pada umumnya rakyat begitu yakinnya akan kebaikan tradisi yang dianut. Melanggar tradisi berarti melanggar adat, sehingga jarang sekali rakyat biasa berani melanggar kebiasaan itu.

Seperti yang dapat kita lihat pada sistem kepemimpinan masyarakat desa Pasir Panjang bahwa mereka mempertahankan untuk tetap memilih pemimpin dari golongan atas atau *Aha Madiata* karena golongan ini dapat membantu mereka ketika mereka mengalami masalah di kemudian hari.

Dapat kita lihat juga bahwa kepemimpinan kepala desa yang ada di desa Pasir Panjang dapat dikatakan kepemimpinan feodal karena terdapat beberapa ciri pokok dari kepemimpinan feodal seperti yang diungkapkan Malayu Hasibuan (2008: 200) bahwa ciri-ciri pokok dari cara-cara feodal yaitu:

1. Pemimpin menentukan segala kegiatan kelompok secara sepihak.
2. Pengikut sama sekali tidak diajak untuk ikut serta merumuskan tujuan kelompok dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Pemimpin terpisah dari kelompok dan seakan-akan tidak ikut dalam proses interaksi di dalam kelompok tersebut.

Seperti yang dijelaskan John Rawls bahwa dalam teori keadilan yang dikemukakannya pada dasarnya adalah untuk membentuk keadilan sebagai keadilan (*Justice as Fairness*) artinya, keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan bagi Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi.

Sebagai *afirmasi* atau penegas dari konsep *Justice as Fairness* Rawls atau konsep keadilan sebagai keadilan maka Rawls menjelaskan bahwa keadilan dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang lebih pada individu-individu dalam masyarakat yang paling tidak diuntungkan dalam struktur sosial, kondisi

politik, maupun struktur ekonomi. Maksudnya adalah bahwa adil hendaknya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak diuntungkan dalam kondisi politik misalnya atau orang-orang bawah *Aha Madia* jika dilihat dari keadaan masyarakat desa Pasir Panjang untuk menjadi pemimpin.

BAB VIII

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam teori tentang kepemimpinan yang dikemukakan seorang Sosiolog Jerman, Max Weber bahwa ada tiga macam kepemimpinan, yaitu: *Pertama*, Kepemimpinan Tradisional. Kepemimpinan ini menuntut ketaatan daripada yang dipimpin (rakyat) atas dasar tradisi, yaitu adat istiadat yang turun-temurun (termasuk agama), jadi legitimasi kepemimpinan ini mengacu pada tradisi dan agama. *Kedua*, Kepemimpinan Karismatik. Kepemimpinan ini mengacu pada karisma yang melekat pada sosok tertentu. Dengan kata lain, legitimasi kekuasaan seseorang terletak pada karisma yang ada pada dirinya. *Ketiga*, Kepemimpinan Rasional. Kepemimpinan ini didasarkan pada akal budi. Negara hukum modern adalah bentuk dari jenis kepemimpinan rasional itu. Lembaga-lembaga negara dipilih berdasarkan pertimbangan akal budi rasional manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Pasir Panjang, maka dapat disimpulkan tentang Feodalisme Kepemimpinan Tinjauan Sosiopolitik Masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

1. Bentuk feodalisme kepemimpinan yang ada pada masyarakat desa Pasir Panjang masih bertahan bahkan akan tetap ada dikarenakan masyarakat desa Pasir Panjang memegang teguh tradisi yang ada secara turun temurun bahwa dalam masyarakatnya terdapat strata sosial atau pembagian masyarakat dalam dua bagian dimana ada masyarakat kalangan atas,

bangsawan, orang kaya atau dalam bahasa setempat *aha madiata* dan ada masyarakat kalangan bawah, orang biasa, buruh nelayan atau *aha madia*. Pembagian masyarakat kedalam dua strata sosial ini menjadikan pola kepemimpinan yang ada di desa Pasir Panjang termasuk dalam kepemimpinan tradisional yang dimana legitimasi kepemimpinannya mengacu pada tradisi dan agama.

2. Implikasi dari adanya kepemimpinan feodal ini adalah ada masyarakat yang dirugikan secara langsung maupun tidak langsung, dimana dikarenakan faktor kekeluargaan atau sesama golongan atas (bangsawan) misalnya, selalu mengutamakan keluarganya atau sesama golongannya saja.
3. Respon yang timbul dari adanya kepemimpinan feodal ini adalah dimana ada masyarakat yang setuju dan ada juga yang menolak. Namun, dalam penolakannya ia tidak bisa melakukan protes atau melakukan perlawanan karena memang kemampuannya dalam melawan terhalang oleh kemampuannya dalam hal materi. Karena umumnya apabila ada seseorang dari kalangan bawah mengalami kesusahan maka orang yang akan dimintakan bantuan terlebih dahulu adalah kepala desa yang dalam hal ini, kepala desa adalah orang yang berasal dari golongan *aha madiata*.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan berkaitan dengan Feodalisme Kepemimpinan Tinjauan Sosiopolitik Masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

Hendaknya bagi masyarakat Rinca dalam mengejewantahkan stratifikasi sosial ini tetap memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi pemimpin walaupun ia berasal dari golongan *aha madia*. Selanjutnya adalah agar mereka yang dari golongan *aha madia* hendaknya tidak terlalu bergantung kepada golongan *aha madiata* dalam hal meminta bantuan, namun hendaknya masyarakat mampu diberdayakan agar mampu memiliki penghasilan sendiri.

Selain itu juga saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian tentang bagaimana strata sosial (*aha madia* dan *aha madiata*) pada masyarakat pulau Rinca bisa bertahan sampai sekarang dan mengapa pembagian strata sosial seperti ini tidak terdapat pada masyarakat Bajo lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brassor, Francis. P. *Leadership Traits and Characteristic of Successfull Public Officials*. Handsout American University.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. (2010). *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Msyarakat Desa, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *B uku Acuan Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementrian
- Djaenuri, Aries. (2015). *Kepemimpinan, Etika dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djamiko, Sigit. (2013). *Filsafat Sosial (dari Feodalisme Hingga Pasar Bebas)*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Emory.(2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alvabeta.
- Hasibuan Malayu S.P. (2008). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan, Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, Fahmi. (2012). *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. Jakarta:Rajawali Pres.
- Ivancevich, J. M. Et al. (2008). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Pers.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Paizaluddin, Ermalinda. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. (2014). *Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudiro, Parto. Wiranto. (2010). *Sekali Lagi Tentang Feodalisme*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: R&D Alfabeta.
- Toha, Mifta. (2010). *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiriadihardja, Moeftie. (2015). *Dimensi Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirawan, (2013). *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Prilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alamsyah, M. Nur. (2011). *Memahami Perkembangan Desa di Indonesia*. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad. 02 (03).
- Anwaruddin, Awang. (2009). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Agregasi Aksi Revormasi Government dan Demokrasi. 5 (1): 1-115.

- Aras, Mukhamad dkk. (2013). *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kabupaten Indragiri Hilir Riau*. Humanus. XII (2).
- Fatah, Damanhuri. (2013). *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal TAPIs. 9 (2).
- Haryanto, B. (2008). *Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi dikalangan Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. Jurnal Emisi, 1(1), 61-76.
- Hidayat, Rachmad. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan terhadap Komunikasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi pada Industri Perbankan*. Makara Seri Sosial Humaniora. 17 (1): 19-32.
- H. R. Fitriani Sari dan Ahmad Harakan. (2017). *Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Agregasi Aksi Revormasi Government dan Demokrasi. 5 (1): 1-115.
- Manginsela, Elsj Pauline. (2015). *Struktur Masyarakat dan Kepemimpinan: Kasus Pedesaan di Jawa*. ASE, 11(1) 18-27.
- Natalia, Vica. (2017). *Eksistensi Hukum Adat Bali Analisis Konflik Adat Dan Penyelesaiannya Di Desa Pakraman Tabola Sejak Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2015*. Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya.
- Nicolaus, Open. (2014). *Hubungan Antara Kepemimpinan Tipe Demokratis Kepala Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Di Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur*. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi. 1 (1).
- Nugroho, Heru dkk. (2013). *Kepemimpinan*. Jurnal Mandatory. 10 (1).
- S. Tintin. (2010). *Pengaruh gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada SBU Pos Prima Direktorat Operasi PT Pos Indonesia (PERSERO)*. Jurnal Manajemen. 9 (2).

- Soputan, Chatrinne dkk. (2017). *Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Karembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal Agregasi Aksi Revormasi Government dan Demokrasi. 5 (1): 1-115.
- Sunanto, Edi dan Ismanudin. (2014). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Bidang Layanan Sipil Di Desa Renjeng Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu*. Jurnal Aspirasi. 5 (1).
- Suroso, Hadi dkk. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. Wacana. 17 (1).
- Broto, Anjarahlelono. (2009). *Membedah Feodalisme*, (online), <http://www.pewarta.kabarIndonesiaBlossoft.com>, diakses 28 Desember 2017).
- Ichwan, Alif. (2009). *Kenegaraan Diperlukan Reformasi Kedua.Indonesia Menjadi Negara Maju Pada Tahun 2025*. (online), (<http://Kenegaraan.Diperlukan.reformasi.kedua.indonesia.menjadi.negara.maju.pada.tahun.2025.<<jakarta45.htm>), diakses 10 Januari 2018).
- Isma, Saparni. (2015). *Kepemimpinan Formal dan Informal*, (online), <http://ismasaparni.blogspot.co.id/2015/09/kepemimpinan-formal-dan-informal.html?m=1>, diakses 02 Mei 2018).
- Lubis, Muhtar, (2009). *Feodalismepara Demokrat*, (online), <http://FeodalismeparaDemokrat<<BlogKangKombor.htm>), diakses 03 Januari 2018).
- Lutfi Muhammad. (2015). *Konsep Keadilan*, (online), (<https://suarakebebasan.org/id/opini/item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan>), diakses 03 Februari 2018).

- Modern. (2009). *Feodalisme Jurus Ampuh Kolonialisme Hindia Belanda*, (online), <http://Feodalisme> : FeodalismeJurusAmpuhKolonialsmeHindiaBelanda// BiarSejarah Yang Bicara...htm./, diakses 03 Januari 2018).
- Rahman. (2015). *Makalah Teori Keadilan*, (online), (<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>), diakses 03 Februari 2018).
- Rohadi. (2008). *Pemimpin Feodal: Musuh Bangsa*, (online), (<https://rohadieducation.wordpress.com/kasus-ipdn-kesalahan-memaknai-hakikat-pendidikan/>), diakses 01 Februari 2018).
- Winasis, Agus dalam Muhibbin Syah. (2009). *Kepemimpinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (online), (<http://agus93winasis.blogspot.com/2013/11/pemimpin-formal-informal.html?m=1>), diakses 02 Mei 2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ❖ LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA
- ❖ LAMPIRAN 2 DAFTAR NAMA INFORMAN
- ❖ LAMPIRAN 3 DATA HASIL PENELITIAN
- ❖ LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PENELITIAN
- ❖ LAMPIRAN 5 PERSURATAN

LAMPIRAN 1



PEDOMAN WAWANCARA

Topik Wawancara : Bentuk Feodalisme Kepemimpinan Masyarakat Komodo

Narasumber : Kepala Desa, Mantan Kepala Desa

Pewawancara : Siti Salmi

Pertanyaan

1. Bagaimanakah sistem kepemimpinan yang ada di desa Pasir Panjang?
2. Sejak kapan sistem kepemimpinan ini ada di desa Pasir Panjang?
3. Siapa saja yang dapat menjadi pemimpin di desa Pasir Panjang?
4. Mengapa di desa Pasir Panjang masih di terapkan kepemimpinan feodal?
5. Apakah dengan diterapkannya kepemimpinan feodal ini masyarakat setuju atau tidak?
 - Jika iya, mengapa?
 - Jika tidak, mengapa?
6. Apakah faktor yang mendorong sehingga feodalisme masih diterapkan?
7. Apakah keuntungan yang diperoleh dari kepemimpinan feodal ini?
8. Adakah kerugian yang diperoleh dari kepemimpinan feodal?

Topik Wawancara : Implikasi Feodalisme Kepemimpinan Masyarakat Komodo
Narasumber : Kaur-kaur desa, tokoh adat, masyarakat desa
Pewawancara : Siti Salmi
pertanyaan
1. Bagaimana pendapat Anda tentang feodalisme kepemimpinan?
2. Apa saja dampak positif dari kepemimpinan feodal terhadap masyarakat komodo?
3. Apa saja dampak negatif dari kepemimpinan feodal terhadap masyarakat komodo?
4. Apakah masyarakat merasa rugi dengan adanya kepemimpinan feodal ini?
5. Bagaimanakah sikap masyarakat jika feodalisme berkepanjangan?
6. Bagaimana dalam kepemimpinan feodalisme membangun masyarakatnya?

Topik Wawancara	: Respon Masyarakat Terhadap Sistem Kepemimpinan Feodal Pada Masyarakat Komodo
Narasumber	: Kaur-kaur desa, tokoh adat, masyarakat desa
Pewawancara	: Siti Salmi
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap sistem kepemimpinan feodal?2. Mengapa masyarakat tidak memberi kesempatan atau kepercayaan kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk memimpin?3. Mengapa masyarakat desa lebih memilih orang kaya menjadi pemimpin?4. Mengapa menjadi pemimpin di desa Pasir Panjang masih dilihat dari keturunan?5. Mengapa setiap keputusan harus disetujui masyarakat?6. Adakah masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan pemimpin?<ul style="list-style-type: none">• Jika iya, mengapa?• Jika tidak, mengapa?7. Apakah kepemimpinan feodalisme hanya khusus orang kaya dan keturunannya?8. Apakah harapan masyarakat dengan kepemimpinan feodal?	

LAMPIRAN 2



DAFTAR NAMA INFORMAN

DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : Muhammad Tayeb
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Guru Sekolah Dasar

2. Nama : Muhammad Arok
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Bendahara Desa

3. Nama : Ibu Mariyani
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

4. Nama : Bapak Mardin
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Nelayan

5. Nama : Bapak Herdi
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Guru SMP

6. Nama : Bapak Abas
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Ketua Komite
7. Nama : Bapak Mansur
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Pemandu Wisata
8. Nama : Bapak Mustakim
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Nelayan

Langkah Trianggulasi Data

Daftar Pertanyaan	MT	MY	MT	Intrepetasi
1. Bagaimana sistem kepemimpinan yang ada di desa Pasir Panjang?	Sistem pemerintahan di desa Pasir Panjang adalah sebuah sistem yang pelaku pemerintahannya yang ada di desa tidak bersifat turun temurun, tetapi sistemnya tetap sistem demokrasi. Tetapi dalam sistem demokrasi memilih pemimpin itu lebih dominan dengan sistem <i>aha madiata</i> .	Menurut saya saya melihat bahwa sistem yang ada di desa Pasir Panjang ini masih dipengaruhi oleh <i>aha madia</i> dan <i>aha madiata</i> . Karena <i>aha madiata</i> sangat dihormati keberadaannya dibandingkan dengan <i>aha madia</i> dan masyarakat masih mengikuti sistem yang lama atau turun temurun.	Menurut saya sistem yang ada di desa Pasir Panjang masih mempertahankan sistem <i>pagiri kite</i> (sesama kita). Karena saya melihat bahwa sistem ini tidak ada yang berubah dari dulu hingga sekarang, ia tetap mempertahankan siapa yang kaya dia menjadi pemimpin dan siapa yang miskin dia tetap menjadi orang bawah.	

<p>2. Sejak kapan sistem kepemimpinan ini ada di desa Pasir Panjang?</p>	<p>Sistem pemerintahan kepala desa yang ada di desa Pasir Panjang ini sudah dari tahun 1968 yang dipengaruhi oleh sistem kerajaan pada Kabupaten Manggarai. Sebelum memisahkan diri menjadi Manggarai Barat, sistem yang ada pada Kabupaten Manggarai adalah sistem monarki kerajaan. Setelah sistem kerajaan dihapuskan dari pemerintah menjadi sistem demokrasi, maka dengan sendirinya sistem kerajaan itu</p>	<p>Menurut yang saya ketahui, Sistem ini ada sejak orang di kampung ini menemukan pulau Rinca dan saat itulah sistem itu dibangun dan dipertahankan sampai sekarang.</p>	<p>Sistem seperti ini sebenarnya sudah ada sejak pertama kali masyarakat ada di desa Pasir Panjang karena memang pembagian masyarakat <i>aha madia</i> dan <i>aha madiata</i> ini merupakan turun temurun dari nenek moyang masyarakat di pulau Rinca.</p>	
--	---	--	--	--

	<p>gugur sampai kepada desa Pasir Panjang sehingga diadakan pemilihan kepala desa. Pada masa-masa sebelumnya akan ditunjuk orang kaya, cerdas dan orang yang berpengaruh setidaknya ia dari golongan <i>aha madiata</i> (bangsawan)</p>			
<p>3. Siapa saja yang dapat menjadi pemimpin di desa pasir panjang?</p>	<p>Setiap orang bisa. Semua orang bisa menjadi pemimpin tergantung apakah orang ini memiliki dasar pendidikan yang cukup untuk menjadi seorang</p>	<p>Yang dapat menjadi pemimpin di desa Pasir Panjang yaitu orang yang memiliki kemampuan dan terkhusus orang dari golongan atas. Kalau dia</p>	<p>Saya melihat di desa Pasir Panjang ini yang berhak menjadi pemimpin yaitu <i>aha madiata</i> karena ia punya kekuasaan dan memiliki kekayaan sehingga</p>	

	<p>pemimpin, ia tetap harus berasal dari etnis atas atau boleh boleh dikatakan setidaknya keturunan bangsawan. Kalau dia bukan bangsawan, atau semua orang bangsawan tidak ada yang memiliki pendidikan yang cukup, maka bisalah diambil dari orang bawah. Karena faktor pentingnya adalah latar pendidikan. Namun hanya secara kebetulan strata <i>aha madiata</i> umumnya memiliki pendidikan yang cukup</p>	<p>memiliki kemampuan dan dari golongan bawah tetap saja dia tidak bisa menjadi pemimpin karena ia tidak memiliki harta benda yang dapat diandalkan.</p>	<p>orang-orang <i>aha madia</i> walaupun memiliki kemampuan untuk memimpin, mereka tidak dapat menjadi pemimpin desa Pasir Panjang.</p>	
--	--	--	---	--

	<p>bagus, bahkan rata-rata berpendidikan. Jadi masih feodal? Iya, karena ketika mereka menjadi pemimpin di desa maka sistem feodalisme ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kita lihat bahwa demokrasi dalam pemilihannya tetapi ketika dalam pelaksanaan tugasnya sering ada nuansa feodal misalnya dalam pengangkatan staf, pengangkatan aparat tetap membidik yang namanya keluarga, yang</p>			
--	--	--	--	--

<p>4. Mengapa di desa Pasir Panjang masih di terapkan kepemimpinan feodal?</p>	<p>namanya keturunan.</p> <p>Di desa Pasir Panjang masih diterapkan sistem itu karena sistem sosial masyarakat masih cukup kuat, jadi latar belakang sosial di desa Pasir Panjang ini depegang teguh sehingga berpotensi untuk melaksanakan sistem feodal ini walaupun sistem feodal ini tidak nampak tetapi justru ketika kita mau merasakannya, merenungkannya akan nampak. Contoh</p>	<p>Menurut saya mengapa hal ini terjadi karena orang di desa Pasir Panjang masih dipengaruhi oleh etnis atau golongan <i>aha madiata</i> tadi. Hal ini terjadi karena memang dari dulu ada pembagian masyarakat menjadi dua golongan yaitu golongan <i>aha madia</i> dan <i>aha madiata</i>.</p>	<p>Karena di desa Pasir Panjang orang-orang menganggap bahwa orang kaya yang pantas menjadi pemimpin ketika ada masyarakat mengalami kesulitan atau tidak mampu, maka pemimpin yang kaya yang akan membantu mereka.</p>	
--	--	--	---	--

	<p>misalnya, ada bantuan maka yang akan dominannya dibagi kepada lingkungan terdekat dulu, keluarga, baru dibagiakan kepada orang lain.</p>			
<p>5. Apakah dengan diterapkannya kepemimpinan feodal ini masyarakat setuju atau tidak?</p>	<p>Mereka akan melakukan protes tetapi justru jumlah yang ingin melakukan protes itu jumlahnya kecil. Justru yang setuju adalah dominan dan yang dominan itu adalah mereka yang dari <i>aha madiata</i>. Karena <i>aha madia</i> tadi jumlahnya</p>	<p>Menurut saya, saya tidak setuju dengan sistem kepemimpinan seperti ini karena orang-orang yang dari golongan <i>aha madia</i> atau golongan bawah juga memiliki kemampuan akan tetapi tidak punya peluang karena tadi, banyaknya pengaruh dari golongan</p>	<p>Menurut saya, dengan diterapkannya sistem kepemimpinan seperti ini, ada masyarakat yang setuju dan bahkan mungkin lebih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan sistem kepemimpinan seperti ini. Walaupun ia dari golongan <i>aha madia</i></p>	

	<p>justru lebih kecil sehingga tidak boleh melakukan protes.</p>	<p><i>aha madiata</i> atau gologan atas.</p>	<p>sekalipun ada yang setuju karena apabila mereka mengalami kesulitan, masalah, maka mereka akan meminta bantuan kepada kaum <i>aha madiata</i> tadi.</p>	
<p>6. Apakah faktor yang mendorong sehingga feodalisme masih diterapkan?</p>	<p>Faktor utamanya bahwa di mayarakat Rinca masih ada yang membagi strata sosial masyarakat atas dua strata sosial. diterapkannya sistem demokrasi secara nasional maupun ketitik desa, akan tetapi kepemimpinan di desa</p>	<p>Faktor yang paling penting menurut saya karena faktor kekeluargaan yang memang telah dipertahankan dari dulu sehingga walaupun telah diganti kepala desa, kepemimpinan seperti ini tetap diterapkan karena apa bila dilihat</p>	<p>Menurut saya karena kuatnya pengaruh dari orang-orang kaya, karena apabila pemimpinnya orang kaya maka dapat membantu mereka yang dari <i>aha madia</i>.</p>	

<p>7. Apakah keuntungan yang diperoleh dari kepemimpinan feodal ini?</p>	<p>Pasir Panjang tetap di pegang oleh strata <i>aha madiata</i>. Orang-orang <i>aha madiata</i> belum punya peluang karena latar belakang pendidikan kurang memadai untuk bersaing dengan <i>aha madiata</i>.</p> <p>Secara umum tidak ada keuntungan tetapi lebih mengacu kepada keuntungan secara khusus. Kita melihat bahwa kehidupan <i>aha madiata</i> lebih dekat dengan para pemimpin jadi lebih berpotensi</p>	<p>dengan baik sebenarnya pemimpin sekarang merupakan anggota keluarga dari pemimpin sebelumnya.</p> <p>Menurut saya kepemimpinan seperti ini tidak memberikan keuntungan sedikitpun kepada saya.</p>	<p>Menurut saya ada keuntungan dari kepemimpinan seperti ini, karena apabila ada masyarakat yang mengalami kesulitan atau kesusahan, maka orang dari <i>aha madiata</i> lah yang akan</p>	
--	--	---	---	--

<p>8. Adakah kerugian yang diperoleh dari kepemimpinan</p>	<p>menjadi seorang pemimpin dan berpotensi untuk menikmati pembangunan di bandingkan dengan <i>aha madia</i> walaupun juga mereka memperhatikan tetapi jumlah untuk <i>aha madia</i> tidak sebesar jumlah untuk <i>aha madiata</i>. Karena secara alami terjadi dan berlaku lebih menguntungkan golongan <i>aha madiata</i>.</p> <p>Jadi kerugian ini secara manusiawi bahwa sampai kapanpun</p>	<p>Dengan adanya kepemimpinan seperti ini, saya rasa banyak</p>	<p>membantu mereka.</p> <p>Kerugian dari kepemimpinan seperti ini menurut saya</p>	
--	--	---	--	--

feodal?	golongan bawah ini tetapi di bawah, padahal kita semua tahu bahwa setiap orang punya hak sama di bawah payung hukum (berhak untuk mendapatkan pendidikan, mereka berhak mendapatkan perlakuan hukum) tetapi, golongan atas tidak pernah menindasnya hanya pemahaman bagaimana pentingnya pendidikan bagi <i>aha madia</i> itu masih kurang, masih minim walaupun ada hanya satu atau dua	merugikan masyarakat karena apabila ada seseorang yang memang lebih mampu dalam memimpin namun ia bukan dari golongan atas, maka ia tidak akan bisa menjadi pemimpin. Kemudian hak suara atau ketika masyarakat ingin menyampaikan pendapat mereka, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Keadaan seperti ini mempengaruhi pembangunan desa. Apabila tidak ada	mungkin keadaan masyarakat akan tetap sama atau tidak mengalami perubahan. Walaupun ada kerugiannya, tapi menurut saya lebih banyak keuntungannya.	
---------	--	--	--	--

<p>9. Bagaimana pendapat Anda tentang feodalisme kepemimpinan?</p>	<p>orang saja tetapi lebih banyaknya untuk berpikir, berprestasi, itu tidak penting. Bagi mereka yang penting adalah selama alam masih menyajikan dirinya dan mereka hidup lebih baik, itu cukup.</p> <p>Kalau pendapat saya tentang kepemimpinan ini ada baik dan buruknya, karena kepemimpinan seperti ini bukan hanya orang kaya saja yang bisa menjadi pemimpin akan</p>	<p>kritikan dan masukan dari masyarakat, maka perkembangan desa akan terhambat menurut saya.</p> <p>Menurut pendapat saya dengan adanya kepemimpinan seperti ini banyak masyarakat yang merasa terbelakang alasannya karena apa bila kepemimpinan seperti ini dipertahankan</p>	<p>Kalau menurut saya pribadi, kepemimpinan feodalisme ini tidak bagus karena alasannya kepemimpinan seperti ini sepertinya dalam forum kekeluargaan, memilih kekeluarga</p>	
--	--	---	--	--

	<p>tetapi peraturan yang terjadi di desa Pasir Panjang ini masih memegang kuat istilah kaya dan miskin, jadi menurut saya tidak ada perbedaan kalau ingin menjadi seorang pemimpin yang penting kita mampu menjalankan amanat tersebut dan adil serta tanggung jawab.</p>	<p>maka golongan <i>aha madia</i> tetap <i>madia</i> dan golongan <i>aha madiata</i> tetap <i>madiata</i> karena staf dan aparatnya hanya golongan dari mereka saja.</p>	<p>ataupun golongan yang mereka sukai. Saya sendiri secara pribadi tidak menyetujui.</p>	
<p>10. Apa saja dampak positif dari kepemimpinan</p>	<p>Dampak baiknya dari kepemimpinan ini terhadap masyarakat yaitu: mudah meminta bantuan kepada seorang</p>	<p>Menurut saya dampak baiknya itu ketika dari kami golongan <i>aha madia</i> sakit, kebanyakan yang memberi bantuan</p>	<p>Kalau secara pribadi menurut saya tidak ada dampak baiknya. Itu menurut saya tidak tau kalau menurut</p>	

<p>feodal terhadap masyarakat komodo?</p>	<p>pemimpin, tidak ada alasan bagi pemimpin untuk menolak bantuan dari masyarakat.</p>	<p>dari <i>aha madiata</i> termasuk pemimpin tadi, yang kedua kalau ada orang menikah atau berangkat sekolah kami <i>aha madia</i> hanya dibolehkan memberi uang seiklasnya walaupun itu cuman 5000 rupiah karena kami ditentukan seberapa banyak uang yang harus mereka berikan kepada keluarga yang anaknya menikah atau sekolah tadi.</p>	<p>masyarakat lain karena jujur saja dari segi ini saya tidak pernah melihat dari masyarakat di luar dari kekeluargaan mereka yang mendapatkan bantuan ataupun apa saja yang mencukupi atau kebutuhan prosedur yang harus mereka dapatkan atau harus mereka/wajib mereka punya yang berhak misalnya bantuan.</p>	
---	--	--	--	--

<p>11. Apa saja dampak negatif dari kepemimpinan feodal terhadap masyarakat komodo?</p>	<p>Dampak terhadap masyarakat Rinca dari kepemimpinan feodal ini adanya ketidakadilan dalam pembagian bantuan misalnya nama-nama penerima bantuan yang diberikan dari pusat sebanyak 30 orang. Namun ketika bantuan tersebut sampai di desa Pasir Panjang, nama-nama tersebut banyak yang diganti dengan keluarga dekat dari kepala desa sehingga orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan</p>	<p>Kalau menurut saya disegi kepemimpinan kepemimpinan feodalisme ini perkelompok kalau ada misalnya kegiatan ataupun musyawarah jadi seperti kami masyarakat biasalah yang mereka anggap tidak penting mereka tidak kasih masuk kami dalam forum ataupun dalam kelompok itu, mereka hanya memilih yang mana mereka sukai.</p>	<p>Karena menurut saya mereka hanya memilih dari sisi keluarga saja. Iya kalau menurut saya mereka hanya memilih karena yang berhak menerima bantuan ini mungkin sebagian tidak dapat menerima tapi menurut mereka yang pas untuk menerima ataupun yang berhak itu hanya keluarga.</p>	
---	---	--	--	--

<p>12. Apakah masyarakat merasa rugi dengan adanya kepemimpinan feodal ini?</p>	<p>tersebut harus menunggu sekitar 6 sampai 12 bulan untuk bisa menerima bantuan lagi.</p> <p>Iya, umumnya memang masyarakat merasa dirugikan dengan adanya kepemimpinan seperti ini. Namun masyarakat juga sangat mengharapkan bantuan dari <i>aha madiata</i>. Sehingga walaupun diadakan pemilihan kepala desa berikutnya, tetap mereka akan memilih <i>aha madiata</i>lah</p>	<p>Iya saya merasa rugi karena menurut keperibadian saya misalnya ada yang mampu didalam forum misalnya kegiatan apa saja selain keluarga tetapi mereka tetap saja mengutamakan keluarga sudah banyak buktinya mereka hanya memilih ataupun kelompok mereka yang sukai</p>	<p>Dampak buruknya yaitu ketika ada bantuan atau sesuatu yang menurut kami sangat penting yang selalu diutamakan keluarga, sedangkan kami sebagai <i>aha madia</i> merasa terbelakang dan yang diutamakan dari golongan <i>aha madiata</i>.</p>	
---	---	--	---	--

	yang menjadi pemimpin.	walaupun kelompok itu tidak mampu atau kepribadian orang itu tidak mampu, jadi kalau menurut saya perkembangan seperti ini, seperti orang-orang yang punya wawasan atau anak-anak yang baru tumbuh tetap tidak meningkat.		
13. Bagaimanakah sikap masyarakat jika feodalisme berkepanjangan?	Menurut hemat saya, walaupun sistem kepemimpinan feodal ini tetap berlanjut, tetap ada masyarakat yang pro dan ada juga yang kontra. Karena pada	Saya sebagai masyarakat sangat ingin apabila kepemimpinannya yang ada di desa Pasir Panjang ini bersifat adil bukan hanya adil dari golongan mereka saja	Saya sebagai masyarakat biasa merasa sangat rugiketika saya memiliki kemampuan untuk berpendapat tetapi tidak pernah diundang untuk hadir dalam pertemuan	

	<p>dasarnya memang masyarakat tidak setuju namun, mereka merasa tidak ada cara lain untuk membantu masyarakat bawah atau <i>aha madia</i> selain harus memiliki pemimpin dari golongan <i>aha madiata</i>.</p>	<p>akan tetapi adil dalam semua hak masyarakat.</p>	<p>atau forum-forum.</p>	
<p>14. Bagaimana dalam kepemimpinan feodalisme membangun masyarakatnya?</p>	<p>Kalau menurut saya dalam kepemimpinan feodal ini untuk membangun masyarakatnya adalah dengan memberikan pemerataan bantuan kepada warga desa. Walaupun dalam</p>	<p>Kalau dalam kepemimpinannya seperti itu terus saya yakin masyarakat tidak akan berkembang dan desa Pasir Panjang tidak akan mengalami perubahan.</p>	<p>Menurut saya kalau feodalisme ini berkepanjangan maka di desa ini tidak ada peningkatan bisa di katakan jalan di tempat terus.</p>	

<p>15. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap sistem kepemimpinan feodal?</p>	<p>struktur kepemimpinan masih diisi dari orang-orang bangsawan atau <i>aha madiata</i>. Meskipun untuk penerapannya dirasa sangat sulit.</p> <p>Saya rasa masyarakat kurang setuju dengan sistem kepemimpinan seperti ini. Kalau saya pribadipun sebenarnya tidak setuju dengan kepemimpinan seperti ini, karena tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi pemimpin. walaupun memang</p>	<p>Saya pribadi tidak setuju dengan sistem seperti ini alasannya karena menurut saya apabila sistem seperti ini selalu dipertahankan maka tidak akan ada kemajuan atau perkembangan yang terjadi di desa pasir panjang ini karena mereka masih memilih orang-orang hanya dari</p>	<p>Menurut saya kalau memang dikelompok mereka saja yang mereka inginkan berarti untuk berkembang sangat kecil akan tetapi kalau mereka memberikan peluang kepada orang lain maka bisa saja di desa Pasir Panjang ini akan berkembang , contohnya</p>	
--	---	---	---	--

	golongan <i>aha madiata</i> memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berasal dari <i>aha madia</i> .	golongan kalangan tertentu(keluarga) saya sebagai masyarakat sangat, sangat tidak setuju tetapi bagaimana lagi kami sebagai masyarakat tidak punya keberanian untuk berprotes.	seperti kepribadian saya mereka selalu membelakangi seperti masyarakat biasa dibelakangkan dan yang selalu diutamakan keluarga.	
16. Mengapa masyarakat tidak memberi kesempatan atau kepercayaan kepada orang lain yang	Sebenarnya ada kesempatan bagi orang lain atau orang dari golongan <i>aha madia</i> untuk menjadi kepala desa. Namun ukuran atau syarat untuk menjadi kepala desa di Pulau Rinca adalah	Saya sebagai masyarakat bukannya tidak mempercayai orang lain untuk menjadi pemimpin tetapi kami sebagai masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan dari orang-	Menurut saya masyarakat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi pemimpin, akan tetapi orang miskin atau <i>aha madia</i> tidak memiliki keberanian untuk menjadi	

memiliki kemampuan untuk memimpin?	<p>harus memiliki pendidikan yang cukup, setidak-tidaknya sarjana. Namun apabila kita perhatikan bahwa golongan <i>aha madiata</i> umumnya memiliki pendidikan yang cukup untuk menjadi pemimpin. sedangkan <i>aha madia</i> umumnya hanya sekolah sampai jenjang SMA saja.</p>	<p>orang <i>aha madiata</i> karena orang-orang <i>madiata</i> jumlahnya banyak dibandingkan dengan kami yang jumlahnya sedikit apalagi golongan dari <i>aha madia</i>.</p>	<p>pemimpin.</p>	
17. Mengapa masyarakat desa lebih memilih orang	<p>Karena umumnya masyarakat Rinca adalah orang-orang menengah ke bawah, sehingga untuk mencari bantuan</p>	<p>Saya sebagai masyarakat memilih orang kaya alasannya ketika kami masyarakat biasa atau <i>aha madia</i></p>	<p>Karena masyarakat merasa bahwa orang kaya mampu menjadi pemimpin dan dapat diandalkan dalam hal</p>	

<p>kaya menjadi pemimpin?</p>	<p>atau meminta pertolongan materi hanya kepada orang dari golongan atas (orang kaya). Sehingga pamimpin yang ada di desa Pasir Panjang adalah mereka-mereka yang berasal dari golongan <i>aha madiata</i>.</p>	<p>membutuhkan bantuan atau sakit orang pertama yang kami datangi adalah <i>aha madiata</i> orang yang kami pilih menjadi pemimpin itulah alasannya kenapa kami selalu memilih <i>aha madiata</i> menjadi pemimpin.</p>	<p>meminta bantuan.</p>	
<p>18. Mengapa menjadi pemimpin di desa Pasir Panjang masih dilihat dari keturunan?</p>	<p>Sebenarnya tidak dilihat dari dari keturunan juga kalau menurut saya, hanya saja memang mereka yang dari <i>aha madiata</i> berpendidikan lebih tinggi dari mereka yang dari <i>aha madia</i></p>	<p>Karena dua etnis <i>aha madia</i> dengan <i>aha madiata</i> ini tidak bisa dipisahkan lagi tradisi atau kebiasaan orang-orang di desa pasir panjang tidak lepas dari adatnya kapan dia</p>	<p>Karena mereka menganggap bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah orang kaya. Karena rata-rata masyarakat di desa Pasir Panjang adalah orang miskin.</p>	

<p>19. Mengapa setiap keputusan harus disetujui masyarakat?</p>	<p>sehingga estafed kepemimpinan dipegang oleh orang dari <i>aha madiata</i>. Karena memang masyarakat biasa umunya tidak diikutkan dalam proses pengambilan keputusan atau saat diadakan rapat. Sehingga hasilnya memang harus mereka setuju begitu saja.</p>	<p>menjadi pemimpin otomatis staf-stafnya dari golongan mereka saja(<i>aha madiata</i>) . Karena saya sebagai masyarakat tidak bisa berkomentar tentang keputusan yang dibuat pemimpin karena jumlah kami <i>aha madia</i> sangatlah kecil dan keputusan itu selalu didukung kuat oleh <i>aha madiata</i> yang jumlahnya banyak.</p>	<p>Setiap keputusan pada dasarnya ada masyarakat yang setuju dan ada yang tidak setuju. Namun apabila mereka tidak setuju, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan protes.</p>	
---	--	--	---	--

<p>20. Adakah masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan pemimpin?</p>	<p>Iya pasti ada masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan pemimpin, namun mau bagaimana lagi, mereka tidak bisa menolak hasil yang telah disepakati pemimpin. Kalau ditanya apakah ada yang tidak setuju tentu pasti ada masyarakat yang tidak setuju.</p>	<p>Setiap keputusan yang dibuat pemimpin selalu masyarakat setuju karna walaupun ada masyarakat tidak setuju itu tidak akan membatalkan keputusan karena jumlah masyarakat yang tidak setuju itu rata-rata dari golongan <i>aha madia</i> dan yang setuju itu <i>aha madiata</i>.</p>	<p>Iya ada, tetapi mereka tidak bisa berkomentar ataupun menolak hasil keputusan dari pemimpin.</p>	
<p>21. Apakah kepemimpinan feodalisme hanya khusus orang kaya</p>	<p>Iya kalau menurut saya, karena kepemimpinan feodal pada dasarnya adalah kepemimpinan yang berasal dari orang kaya atau pemilik</p>	<p>Bisa saja orang miskin menjadi pemimpin tetapi kebanyakan masyarakat yang ada di desa Pasir Panjang ini memilih orang kaya karena</p>	<p>Menurut saya iya, karena bisa dilihat dari kepemimpinan yang ada di desa Pasir Panjang bahwa memang kepemimpinannya</p>	

dan keturunannya?	kekuasaan saja.	mereka mengatakan bahwa memilih pemimpin dari golongan <i>aha madiata</i> akan membantu mereka saat kesusahan atau sakit.	hanya untuk orang kaya dan keturunannya.	
22. Apakah harapan masyarakat dengan kepemimpinan feodal?	Kalau harapan saya, sistem kepemimpinan seperti ini lebih baik dihapuskan saja. Namun, sebelum itu juga harus diyakinkan masyarakat untuk mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada orang	Harapan kami sebagai masyarakat walaupun kepemimpinannya dilihat dari keturunan akan tetapi adalah masyarakat yang menerima bantuan dan bukan hanya dari golongan mereka saja.	Kami berharap walaupun kepemimpinan seperti ini, haruslah berlaku adil baik kepada keluarga dan masyarakat biasa.	

	<p>lain. Setelah masyarakat mampu, maka sistem kepemimpinan menjadi terbuka dan siapa saja dapat menjadi pemimpin desa.</p>			
--	---	--	--	--

Table Langkah Analisis Data

Rumusan Masalah	Wawancara	Dokumentasi	Observasi	Partisipatif	Interpretasi
1. Bentuk Feodalisme Kepemimpinan Pada Masyarakat Komodo?	Muhammad Tayeb menjelaskan bahwa masyarakat pulau rinca adalah masyarakat yang homogen. Namun yang dominan adalah suku Bajo. Maka terjadi penggalan atau pengkotak-kotakan atau pengelompokan dimana terdapat aha madia dan aha madiata. Sampai	Dilihat dari proses pengambilan keputusan yang dimana, hanya orang-orang dekat atau keluarga dari kepala desa saja yang ikut dalam proses pengambilan keputusan atau rapat yang diadakan.	Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di desa Pasir Panjang terkait dengan bentuk feodalisme kepemimpinan maka peneliti menemukan fakta bahwa di desa Pasir Panjang bentuk kepemimpinan feodal ini tetap bertahan. Sistem kepemimpinan yang	Peneliti juga ikut dalam rapat atau proses pengambilan keputusan namaun, peneliti tidak diperbolehkan untuk ikut dalam forum, melainkan hanya bisa menunggu diluar ruangan.	

	<p>kapanpu dua strata sosial yang ada pada masyarakat bajo khususnya desa Pasir Panjang tidak akan pernah menyatu karena akan tetap bertolak dari strata manakah seseorang itu mulai. Ia juga menjelaskan bahwa pada masyarakat desa Pasir Panjang akan tetap mempertahankan yang namanya <i>aha madia</i> dan <i>aha madiata</i> sehingga</p>		<p>ada di desa walaupun dalam proses pemilihannya dilakukan dengan cara-cara yang demokratis, namun setelah terpilih menjadi pemimpin, feodalisme ini secara tidak langsung diterapkan pada proses kepemimpinannya.</p>		
--	--	--	---	--	--

	<p>feodalisme dalam kepemimpinanpun tidak akan pernah hilang. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tetap mempertahankan strata <i>aha madia</i> dan <i>aha madiata</i> sampai-sampai dalam memilih seorang kepala desa tetap ada strata yang lebih diutamakan. Sehingga dalam sistem pemerintahan masih tetap sistem feodal.</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>2. Bagaimanakah Implikasi Feodalisme Kepemimpinan Pada Masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat?</p>	<p>Dari hasil wawancara dengan Bapak Mardin mengatakan bahwa saya sebagai masyarakat biasa merasa sangat dirugikan ketika saya memiliki kemampuan untuk berpendapat tapi tidak pernah diundang hadir dalam pertemuan atau forum-forum. Saya juga sebagai masyarakat merasa dirugikan apabila ada bantuan</p>	<p>Seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini bahwa dalam pembagian bantuan desa, tidak semua warga desa mendapatkan bantuan. Hanya orang-orang yang dekat atau keluarga dari kepala desa sajalah yang di dahulukan dalam pebagian bantuan tersebut. Dalam hal ini adalah pembagian bantuan renofasi rumah di</p>	<p>Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di desa Pasir Panjang bahwa pola kepemimpinan yang ada disana memang masih tradisional dimana sitem feodal ini tumbuh subur. Sistem sosial masyarakat bajo khususnya yang ada di suku Bajo khususnya masyarakat desa Pasir Panjang memberikan peluang besar</p>	<p>Peneliti dalam hal pembagian bantuan rumah yang diberikan kepada masyarakat termasuk dalam keluarga yang mendapatkan bantuan renovasi rumah.</p>	
--	--	--	---	---	--

	<p>tapi selalu diabaikan dan hanya dari mereka saja yang menerima. Selain itu, juga dijelaskan oleh Ibu Mariyani bahwa kalau memang di kelompok mereka yang mereka inginkan berarti untuk berkembang sangat kecil akan tetapi kalau mereka memberikan peluang kepada orang lain maka bisa saja di desa</p>	<p>desa Pasir Panjang.</p> 	<p>kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang terdiri dari kalangan atas. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa bagaimanapun dalam pelaksanaan pemilihan dilakukan secara demokratis, namun setelah menjadi kepala desa praktek-praktek feodalisme dan nepotisme tetap ada.</p>		
--	--	---	--	--	--

	Pasir Panjang ini akan berkembang.				
3. Bagaimanakah Respon Masyarakat Terhadap Sistem Kepemimpinan Feodalisme Pada Masyarakat Komodo Kabupaten Manggarai Barat?	Seperti yang dijelaskan oleh Mustakim saat diwawancarai bahwa menurut saya apabila sistem seperti ini selalu dipertahankan maka tidak akan ada kemajuan atau perkembangan yang terjadi di desa Pasir Panjang ini karena mereka masih memilih orang-orang hanya dalam		Berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti didapatkan bahwa ada sebagian masyarakat yang memang tidak setuju dengan cara kepemimpinan yang lebih mengutamakan kekeluargaan atau kedekatan keluarga. Namun masyarakat tetap memilih orang-orang dari		

	<p>kalangan atau golongan tertentu (keluarga saja). Saya sebagai masyarakat sangat tidak setuju tetapi bagaimana lagi kami sebagai masyarakat tidak punya kemampuan untuk protes.</p>		<p>golongan <i>aha madiat</i> untuk menjadi pemimpin karena umumnya mereka adalah orang kaya sehingga apabila ada warga yang sakit atau terkena musibah, maka langsung dapat dimintai bantuan.</p>		
--	---	--	--	--	--

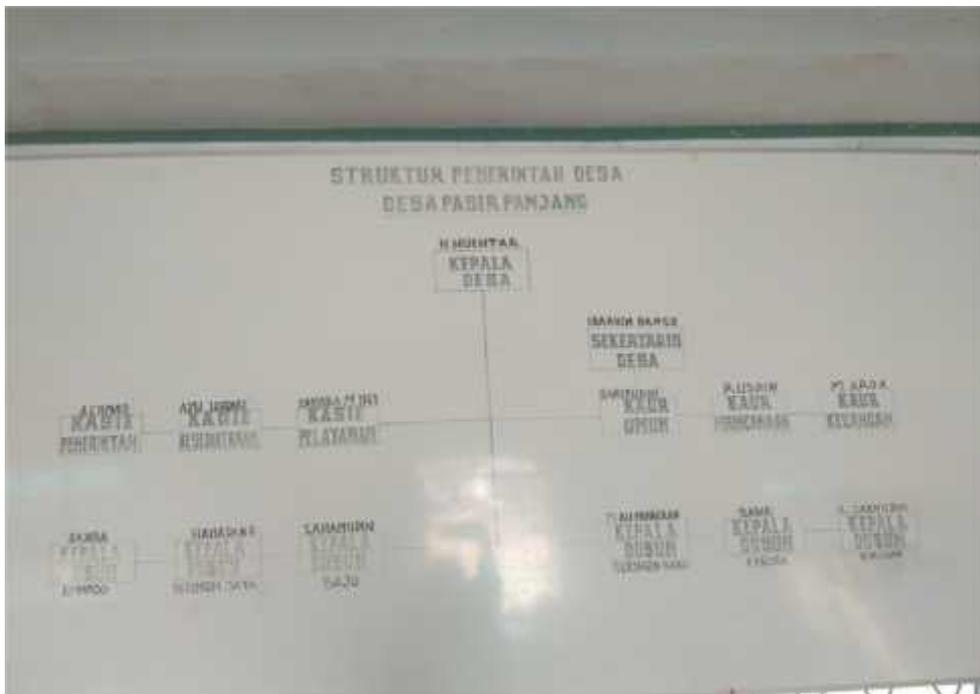
LAMPIRAN 4



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1: Kantor Kepala Desa Pasir Panjang



Gambar 2: Struktur Kepemimpinan Desa Pasir Panjang



Gambar 3: Keadaan Kantor Desa



Gambar 4: Silaturahmi Warga dengan Perseroan Terbatas



Gambar 5: Foto Bersama Kepala Desa



Gambar 6: Proses Wawancara



Gambar 7: Proses Wawancara



Gambar 8: Proses Pembangunan Dermaga



Gambar 9: Keadaan Sosial Masyarakat

LAMPIRAN 5



LAMPIRAN 3



DATA HASIL PENELITIAN

RIWAYAT HIDUP



Siti Salmi, lahir di Rinca, pada tanggal 17 Januari 1995. Penulis adalah anak ke dua dari 5 bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Ishaka Muhammad Ihi dan Siti Alang, saat ini keluarga penulis Ayah, Ibu dan Adik berdomisili di Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 2002-2008 di SD NEGERI Pulau Rinca Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian melanjutkan ketingkat pendidikan di MTs Darussalam Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2008-2011, dan mulai mengikuti berbagai kegiatan dan organisasi di sekolah, dan melanjutkan Pendidikan di MAN Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2011-2014. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2014. Penulis mengambil program srata satu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi. penulis sangat bersyukur telah di berikan kesempatan untuk menimbah ilmu di jenjang pendidikan sebagai bekal kehidupan dunia akhirat dan semoga mendapat rahmat dari Allah Swt di kemudian hari. Dan Alhamdulillah sekarang ini telah berhasil menyusun tugas akhir dengan judul “FEODALISME KEPEMIMPINAN (TINJAUAN SOSIOPOLITIK MASYARAKAT KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT)”.